

**FAKTOR – FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM
PENCAIRAN DANA PROYEK DI KABUPATEN PASURUAN**

**(Studi di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bagian
Pencairan Dana Proyek)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat – Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Muhammad Fajar Maulidi

125010100111162



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR – FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PROSES PENCAIRAN DANA PROYEK DI KABUPATEN PASURUAN (Studi di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bagian Pencairan Dana Proyek)**

Identitas Penulis

a. Nama : **Muhammad Fajar Maulidi**
b. NIM : **125010100111162**
Konsentrasi : **Hukum Administrasi Negara**
Jangka Waktu penelitian : **10 Bulan**

Disetujui pada tanggal 24 September 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, S.H., M.Hum.

Lutfi Efendi, SH.,M.Hum.

NIP. 196208231986011002

NIP. 197703052009122001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

HALAMAN PENGESAHAN

**FAKTOR – FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PROSES
PENCAIRAN DANA PROYEK DI KABUPATEN PASURUAN
(Studi di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Bagian Pencairan Dana Proyek)**

Oleh :

Muhammad Fajar Maulidi

125010100111162

Skripsi ini Telah Disahkan Oleh Majelis Penguji Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Istislam, S.H., M.Hum.

NIP. 196208231986011002

Lutfi Efendi, SH.,M.Hum.

NIP. 196008101986011002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

NIP. 196008101986011002

Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si.

NIP. 196208051988021001

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur mendalam penulis panjatkan pada Allah SWT atas berkah serta karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul **“FAKTOR – FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PROSES PENCAIRAN DANA PROYEK DI KABUPATEN PASURUAN (Studi di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bagian Pencairan Dana Proyek)”**.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih atas semua bantuan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terimakasih tersebut penulis sampaikan kepada:

1. Allah swt yang telah memberikan kesehatan sampai saya telah menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga tercinta, Ayah Ibu dan Adik tersayang atas kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada henti, khususnya selama penulis menyelesaikan kuliah.
3. Bapak Dr. Rachmad Syafa'at, S.H. M.Si. selaku Dekan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
5. Bapak Dr. Istislam, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.

6. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Partai Mahasiswa Pinggiran yang telah memberikan tempat buat saya belajar secara informal selama dalam masa perkuliahan.
8. ALSA dan LESC yang telah memberikan wadah pembelajaran organisasi.
9. Anak – anak gazebo belakang tempat saya bermain dan bertukar pikiran.
10. Serta sahabat dan teman teman yang sangat saya sayangi dan banyak pendukung lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat memberikan hal yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis juga.

Malang, 24 September 2018

Penulis,

Muhammad Fajar Maulidi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DATAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Penyelenggaraan Pemerintah Republik Indonesia.....	14
B. Sejarah Kelahiran Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik .	18
C. Pengertian Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.....	20
D. Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia	22
E. Tinjauan Umum Penyelenggaraan APBD	28
F. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Daerah	29
G. Tinjauan Umum Tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ...	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Metode Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Populasi dan Sample	39

G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Definisi Operasional.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Pemerintahan Kabupaten Pasuruan.....	41
B. Proses Pencairan Dana Proyek di Kabupaten Pasuruan.....	52
C. Faktor yang Menghambat Pencairan Dana Proyek di Kabupaten Pasuruan	63
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74



DAFTAR TABEL

Tabel. 1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel. 2 Nama Instansi yang Terlibat Dalam Proses Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Pasuruan	46
Tabel. 3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pasuruan dan Komponennya	47
Tabel. 4 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016/2018	
Tabel. 5 Belanja Daerah	48
Tabel. 6 Pembiayaan Daerah Tahun 2016	49
Tabel. 7 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan	51



RINGKASAN

Muhammad Fajar M, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, September 2018, **FAKTOR – FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PENCAIRAN DANA PROYEK DI KABUPATEN PASURUAN (Studi di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek)**. Dosen Pembimbing: Dr. Istilam, SH., M.H dan Lutfi Efendi, SH., M.Hum. Kata Kunci: Efektifitas, Pencairan Dana Proyek, perpres no. 54 tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Penelitian ini mengkaji serta menganalisis faktor yang menghambat dalam pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini juga menganalisis lebih spesifik mengenai seberapa efektif pelaksanaan dan koordinasidari proses pencairan dana yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan kepada instansi terkait.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan dua titik permasalahan yang ada diantaranya yaitu bagaimana pelaksanaan pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan? Apa faktor – faktor yang menghambat pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis.

Kenyataan pada yang terjadi di lapangan adalah bahwa pengelolaan keuangan untuk eksekusi pencairan dana masih belum efektif dikarenakan jangka waktu yang ditetapkan masih belum ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap hasil pencairan dana tersebut, sehingga CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group jangka waktu dalam pencairan dananya masih belum dapat diketahui karena belum adanya sebuah peraturan yang berlaku terkait dengan eksekusi pencairan dana. Disamping itu Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 hanya menjelaskan proses atau alur terhadap pencairan dana, akan tetapi masih belum ada landasan terhadap suatu peraturan yang eksplisit terkait dengan waktu yang

ditentukan terhadap proses pencairan dana, sehingga jika ada peraturan yang mengatur terkait dengan waktu dalam eksekusi pencairan dana setelah proses administrasi sudah dipenuhi sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, maka proses tersebut berjalan dengan efektif.



SUMMARY

Muhammad Fajar M, Law of State Administrative, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, September 2018, **FACTORS THAT HOLD THE SUPPORT OF PROJECT FUNDING IN PASURUAN DISTRICT (Study in the Office of Housing and Settlement Areas Section of Project Fund Disbursement)**. Supervisor: Dr. Istilam, SH., M.H and Lutfi Efendi, SH., M.Hum. Keywords: Effectiveness, Project Fund Disbursement, Perpres no. 54 of 2010, Pasuruan Regency Government.

This study examines and analyzes the factors that hinder the disbursement of project funds in Pasuruan Regency. This study also discussed more specifically about the effectiveness and coordination of the process of disbursement of funds carried out by the Pasuruan Regency Government to the relevant agencies.

In this study, researchers found two factors, namely kidnapping project disbursement funds in Pasuruan Regency? What are the factors that led to the disbursement of project funds in Pasuruan Regency? The type of research used in this study is juridical empirical with sociological juridical approach.

The reality that occurs in the context is that financial management for achieving disbursement is still not effective because the time that has not yet been determined by the Pasuruan Regency Government for the disbursement of the funds, CV. Friend Services and CV. Aladin Jaya Group's period of time in disbursing funds is still not yet recognizable because there are no applicable regulations related to disbursement of funds. Besides that the Presidential Regulation No. 54 of 2010 only describes the process or flow of funds disbursement, but there is still no foundation in accordance with the provisions related to the appropriate time for disbursement of funds, namely there are very general restrictions with the time of recording - funds after the administration process already in accordance with the date that has been set, then the process runs effectively.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, dihadapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks dalam upaya mensejahterakan rakyat. Pemikiran tentang kesejahteraan rakyat sebenarnya sudah ada sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Berkenaan dengan pelayanan umum, Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Keberhasilan pemerintah dalam menangani setiap masalahnya, salah satunya dapat diukur melalui keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri. Pelayanan publik merupakan seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

¹Alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang terkait dengan kepentingan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang dimaksud adalah semua lembaga dan petugas pelayanan publik baik pemerintah daerah maupun badan usaha milik daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik.²

Kinerja birokrasi pada saat ini merupakan topik pembicaraan yang tiada hentinya untuk dikritisasi, hal tersebut karena kinerja aparatur negara yang dirasa kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dapat dengan mudah dibuktikan dengan dimana tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidak puasan mereka. Harus diakui , bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaharuan, baik dari segi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan didalam pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaharuan dapat kita lihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan.

Pada dasarnya bentuk pelayanan di Indonesia masih sangatlah buruk dikarenakan proses birokrasi itu sendiri yang sangat berbelit – belit. Ketidak -efisienan dan efektifnya kinerja pegawai dalam melaksanakan

² Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000, hlm. 59

tugasnya merupakan salah satu faktor penghambat dalam memberikan bentuk pelayanan publik. Pelayanan dapat dikatakan baik, apabila pelayan tersebut dapat memenuhi kepuasan pelanggan, dan kepuasan tersebut akan tercapai apabila pelayanan yang mereka terima dapat melebihi apa yang mereka dapat.

Kabupaten Pasuruan adalah wilayah yang sedang berkembang maka dari itu pelayanan yang diberikan oleh seluruh instansi – instansi yang ada didalamnya terutama dalam hal perizinan haruslah maksimal agar masyarakat tersebut merasa tidak dirugikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar ketidakpuasan.

Di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan pelayanan yang sudah diberikan sudah cukup bagus, akan tetapi masih saja terdapat beberapa oknum yang sering kali menyalahgunakan kewenangannya dalam melayani konsultan ataupun kontraktor yang datang. Beberapa kasus yang sering kali terjadi konsultan atau kontraktor tersebut telah melengkapi berkas – berkasnya namun pencairan dana proyeknya masih terkesan lama bagi mereka, salah satu kontraktor yaitu CV. Jasa Teman yang beralamat di Jalan Hngtuah Gg. III No.7A, Rt04/Rw01 Kel. Tambaan - Pasuruan.CV tersebut menerangkan bahwa sudah mengurus pencairan dana sesuai dengan prosedur tetapi tetap membutuhkan waktu yang lama untuk pencairan dana yang semestinya harus diterima yang sesuai dengan

perjanjian yang telah diperjanjikan. Hal tersebut dikarenakan perpres no. 54 tahun 2010 tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana prosedur penagihan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, sedangkan atas keterlambatan pembayaran kepada pengguna anggaran maka pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat dimintai ganti rugi bunga yang dihitung dari nilai tagihan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 122 huruf (a) perpres no. 54 tahun 2010 yang berbunyi :

PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau
- b) dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Adapun langkah – langkah pencairan dana proyek sesuai dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf (f) sampai dengan huruf (i), yakni :

1. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; (huruf (f))
2. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; (huruf (g))

3. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan (huruf (h))
4. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (huruf (i))

CV. Jasa Temandan CV. Aladin Jaya Group mengatakan bahwa proses pencairan dana proyek mengalami hambatan pada proses pencairan dana di Badan Pengolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) yang biasanya 1 minggu paling cepat lamanya sekarang bahkan bisa sampai 1 bulan. CV. Jasa Teman juga mengatakan “kalau terjadi seperti ini terus tentu kami akan mengalami kerugian”.

Perpres no 54 tahun 2010 telah mengatur tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.³ Hal tersebut tentunya berkaitan sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang – Undang no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan AUPB terdiri dari 8 (delapan) asas sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

³ Perpres no 54 tahun 2010

2. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan

Warga

Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita

3. Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas Pelayanan Yang Baik

Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud diatas dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Asas – asas tersebutlah yang seharusnya menjadi acuan untuk pelayan publik yang terkhususkan di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan.

Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengangkat judul “FAKTOR – FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PENCAIRAN DANA PROYEK DI KABUPATEN PASURUAN (Studi di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek)”.

Salah satu fungsi pemerintahan yang utama adalah menyelenggarakan pelayanan umum sebagai wujud dan tugas umum pemerintahan, untuk mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yaitu yang efisien, efektif, adil, transparan, dan akuntabel.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Keterangan
1.	2015	Negarawan Adhitama Putra	IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI WUJUD PRAKSIS PASAL 53 AYAT 2	Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap implementasi asas – asas

			UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 (Studi Pada PTUN Semarang)	umum pemerintahan yang baik sebagai uji Keputusan Tata Usaha Negara yang ada di PTUN Semarang
2.	2017	Misbahul Hayati	IMPLEMENTASI ASAS PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK DALAM MENINGKATKAN KINERJA DI KANTOR KECAMATAN TUMIJAJAR, KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	Penelitian ini memfokuskan terhadap penerapan asas – asas umum pemerintahan yang baik dalam meningkatkan kinerja di Kantor Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat serta hambatan yang terjadi
3.	2015	Muhamad Azhar	RELEVANSI ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA	Penelitian ini lebih memfokuskan terhadap relevansi setelah berlakunya Undang – Undang no 30 tahun 2014

4.	2013	Lalu Dedhi Kusuma	PENERAPAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM PENERBITAN IZIN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR	Penelitian ini memfokuskan terhadap asas – asas umum pemerintahan yang baik manakah yang sudah di terapkan di Kabupaten Lombok Timur yang dalam hal ini dispesifikan dalam hal penerbitan izin.
----	------	-------------------	---	---

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti akan merumuskan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan?
2. Apa faktor – faktor yang menghambat pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka peneliti akan memberikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan.

2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan. (Studi di Pemerintahan Kabupaten Pasuruan)

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti yang akan datang

Dapat dijadikan acuan serta referensi dalam menyusun penelitian yang berkaitan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi mengenai permasalahan tentang pelayanan publik khususnya di daerah Kabupaten Pasuruan.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini dapat tersusun dengan baik, sistematis, dan mudah di mengerti maka sistematika yang digunakan terdiri dari 5 (lima) bab yang di tulis secara berurutan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar belakang penulisan
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penulisan
- d. Manfaat penulisan

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Kajian Pustaka berisi tentang teori atau doktrin yang mengkaji dan membahas tentang Asas – asas umum pemerintahan yang baik.

BAB III : METODE PENELITIAN

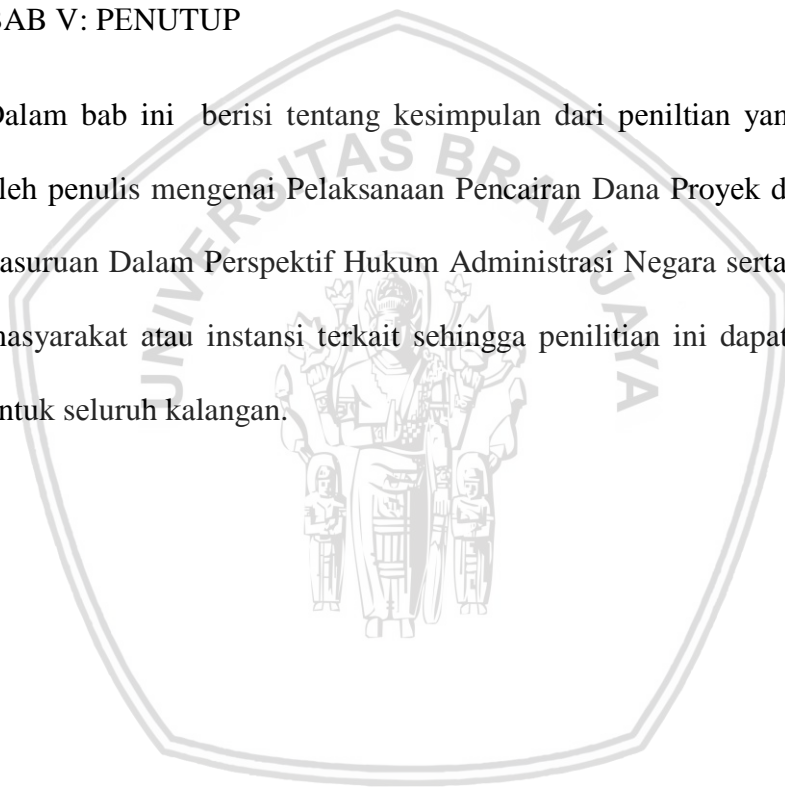
- a. Jenis Penelitian
- b. Metode Pendekatan
- c. Lokasi Penelitian
- d. Jenis Data dan Sumber Data
- e. Teknik Pengumpulan Data
- f. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling
- g. Teknik Analisis Data
- h. Definisi Operasional

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai pembahasan terhadap fokus kajian penulisan terkait tentang Pelaksanaan Pencairan Dana Proyek di Kabupaten Pasuruan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara sehingga dapat ditemukan kendala yang terjadi terhadap penerapan Asas tersebut.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari peniltian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pelaksanaan Pencairan Dana Proyek di Kabupaten Pasuruan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara serta saran untuk masyarakat atau instansi terkait sehingga penelitian ini dapat bermanfaat untuk seluruh kalangan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penyelenggaraan Pemerintah Indonesia

1. Hakikat Pembangunan dan UUD 1945

Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri sejahtera, berkeadilan, berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sesuai tujuan yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa hakikat pembangunan nasional adalah : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan, maka tujuan nasional harus diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara merupakan penggerak (fasilitator) perwujudan tujuan nasional itu sendiri. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili seluruh kepentingan seluruh bangsa. Pembangunan Pancasila dan UUD 1945 merupakan landasan pembangunan yang ideal. Keduanya telah merumuskan dengan baik konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai dengan sosial dan budaya Indonesia. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan

kemampuan rakyat yang kemudian dilakukan oleh pemerintah disertai dengan dukungan rakyat, serta selanjutnya akan dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat. Dalam Negara yang sedang dalam masa transisi menuju negara demokrasi, maka pembangunan belum dapat berlangsung sesuai dengan harapan tersebut diatas. Pemerintah tentunya sebagai penggerak pembangunan berfungsi untuk melaksanakan pembangunan yang disertai dukungan atau bantuan dari rakyat. Dalam hal ini rakyat atau masyarakat harus diberdayakan.

2. Landasan Penyelenggaraan Pembangunan

Pembangunan di Indonesia sesungguhnya merupakan proses memanusiakan manusia yang dihadapkan pada banyak tantangan. Dalam menjalankan ketatanegaraan di Indonesia dikenal tujuh kunci pokok, yakni:

- a) Indonesia merupakan negara hukum,
- b) Sistem konstitusional,
- c) Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat,
- d) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi,
- e) Presiden tidak bertanggung jawab atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),
- f) Menteri merupakan pembantu presiden,dan
- g) Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.

3. Nilai – nilai Pembangunan

Pembangunan nasional itu sesungguhnya adalah pembangunan yang dilakukan secara sinergis, harmonis, dan dinamis oleh segenap bangsa Indonesia. Pembangunan sesungguhnya adalah upaya memecahkan permasalahan bangsa dalam wujud menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar.

Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nilai pembangunan sendiri dapat dipahami sebagai perwujudan untuk mewujudkan cita – cita pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁴

4. Prinsip Penyusunan Program Pembangunan Nasional

Prinsip pembangunan haruslah sesuai dengan nilai – nilai kebangsaan yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan bertujuan untuk memanusiakan manusia untuk meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan daya saing manusia yang ada di Indonesia. Dalam memanusiakan manusia tentunya harus ditunjang dengan sarana dan prasaran yang memadai. Tujuan dari sarana dan prasarana yang

⁴ Pembukaan UUD 1945 alinea 4 (empat)

mewadahi ini merupakan sebuah basis pendukung bagi pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan Nasional juga harus mempunyai prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan visi penting yang harus dijalankan suatu pemerintahan dalam pembangunan nasional yang berpegang teguh pada kesejahteraan rakyat yang tertuang dalam UUD 1945. Pembangunan berkelanjutan diharapkan agar seluruh daerah di Indonesia dapat berkembang dengan maksimal.

5. Pemerintahan di Indonesia

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas dan penduduk yang sangat banyak yakni lebih dari dua ratus juta jiwa. Pemerintah pusat tentunya tidak dapat menjangkau seluruh daerah di Indonesia oleh karenanya dibentuklah UU no 32 tahun 2004 tentang “pemerintahan daerah” dan diperbaharui lagi oleh UU no 23 tahun 2014 tentang “pemerintahan daerah” karena dirasa kurang relevan. Pemerintahan daerah mempunyai fungsi untuk mengatur daerah otonominya. Pemerintah pusat hanya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah.⁵

Pemerintahan daerah diberikan otonomi seluas – luasnya untuk mengatur daerah otonominya. Hal tersebut ditujukan agar tiap – tiap daerah dapat mengetahui kebutuhan daerahnya masing, sebab daerah di Indonesia mempunyai sosial, adat, dan budaya masing sehingga dengan

⁵ UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 7 ayat (1)

diberikannya otonomi daerah oleh pemerintah pusat diharapkan agar daerahnya dapat berkembang dengan maksimal.

Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan Undang – Undang Dasar tahun 1945 dan dibantu oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu. Presiden saat ini menjabat Joko Widodo 2014 – 2019 mempunyai salah satu misi yakni “mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera” tentunya hal tersebut berkaitan dengan pembangunan. Fokus Presiden Indonesia saat ini pun terfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Beliau berpendapat bahwa “Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dianggap perlu terkoneksi dengan baik”.⁶

B. Sejarah Kelahiran Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Sejak dianutnya konsepsi welfare state, yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan umum warga negara dan untuk mensejahterakan ini pemerintah diberi wewenang untuk campur tangan dalam segala lapangan kehidupan masyarakat, yang dalam campur tangan ini tidak saja berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bertindak tampak bersandar pada peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan inisiatif sendiri melalui freies Ermessen, ternyata menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga negara. Karena dengan freies ermessen muncul peluang terjadinya benturan kepentingan antara

⁶ Beritasatu.com Jakarta, Sabtu 28/10 2017

pemerintah dan rakyat baik dalam bentuk onrechtmatig overheidsdaad, detournement de pouvoir, maupun dalam bentuk willekeur, yang merupakan bentuk-bentuk penyimpangan tindakan pemerintahan yang mengakibatkan terampasnya hak-hak asasi warga negara.⁷

Guna menghindari atau meminimalisasi terjadinya benturan tersebut, pada 1946 pemerintah Belanda membentuk komisi yang dipimpin oleh de Monchy yang bertugas memikirkan dan meneliti beberapa alternatif tentang Verhoogde Rechtsbescherming atau peningkatan perlindungan hukum bagi rakyat dari tindakan administrasi negara yang menyimpang. Pada 1950 komisi de Monchy kemudian melaporkan hasil penelitiannya tentang verhoogde rechtsbescherming dalam bentuk “algemene beginselen van behoorlijk bestuur” atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hasil penelitian komisi ini tidak seluruhnya disetujui pemerintah atau ada beberapa hal yang menyebabkan beberapa pendapat antara komisi de Monchy dengan pemerintah, yang menyebabkan komisi ini dibubarkan oleh pemerintah. Kemudian muncul komisi van de Greenten, yang juga dibentuk pemerintah dengan tugas yang sama dengan de Monchy. Namun, komisi kedua ini juga mengalami nasib yang sama, yaitu ada beberapa pendapat yang diperoleh dari hasil penelitiannya tidak disetujui oleh pemerintah, dan komisi ini pun dibubarkan tanpa membuahkan hasil.⁸

Terbukti dengan dibubarkannya dua panitia tersebut, ditambah pula dengan munculnya keberatan dan kekhawatiran di Nederland terhadap

⁷Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal 230 - 231

⁸ Amrullah Salim, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, dalam Paulus E. Lotulung, hal 127-128.

AAUPB karena dikhawatirkan asas-asas ini akan digunakan sebagai ukuran atau dasar pengujian dalam menilai kebijakan- kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, ternyata hasil penelitian de Monchy ini digunakan dalam pertimbangan putusan-putusan Raad van State dalam perkara administrasi. Dengan kata lain, meskipun AAUPB ini tidak mudah memasuki wilayah birokrasi untuk dijadikan sebagai norma bagi tindakan pemerintahan, tetapi tidak demikian halnya dalam wilayah peradilan. Seiring dengan berjalannya waktu, keberatan dan kekhawatiran para pejabat dan pegawai pemerintahan tersebut akhirnya hilang, bahkan sekarang sudah diterima dan dimuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Netherland.⁹

C. Pengertian Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Pengertian AAUPB menurut Ridwan HR :

Pemahaman mengenai AAUPB tidak hanya dapat dilihat dari segi kebahasaan saja namun juga dari segi sejarahnya, karena asas ini timbul dari sejarah juga. Dengan bersandar pada kedua konteks ini, AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.¹⁰

⁹ SF. Marbun, *Hukum Administrasi Negara 2*, (Jakarta : FH UII Press, 2014), hal 355

¹⁰Ridwan HR, Op.Cit, hal 247

Pengertian AAUPB menurut Jazim Hamidi :

Definisi AAUPB menurut hasil penelitian Jazim Hamidi, antara lain :

- a. AAUPL merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum Administrasi Negara.
- b. AAUPL berfungsi sebagai pegangan bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud penetapan atau beschikking) dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
- c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digalidalam praktik kehidupan di masyarakat.
- d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif.¹¹

Pengertian AAUPB menurut Hadjon :

AAUPB yang telah mendapat pengakuan dalam praktek hukum di Belanda, yaitu asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan (motivasi), larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang.¹²

¹¹Nomensen Sinamo S.H, M.H. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010). hal. 142

¹² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press , 2008), hal. 270

D. Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia

Pada mulanya keberadaan AAUPB ini di Indonesia belum diakui secara yuridis formal. Ketika pembahasan rancangan undang-undang RUU peradilan tata usaha negara (RUU PTUN) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (F-ABRI) mengusulkan agar asas-asas tersebut dimasukkan sebagai salah satu alasan gugatan terhadap keputusan badan/pejabat tata usaha negara. Tetapi, usulan ini tidak diterima oleh pemerintah dengan alasan yang dikemukakan Ismail Saleh, selaku Menteri Kehakiman waktu itu yang mewakili pemerintah.¹³ Alasan pemerintah adalah sebagai berikut:

“Menurut hemat kami, dalam praktik ketatanegaraan kita maupun dalam Hukum Tata Usaha Negara yang berlaku di Indonesia, kita belum mempunyai criteria tentang algemene beginselen van behoorlijk bestuur tersebut yang berasal dari negeri Belanda. Pada waktu ini kita belum memiliki tradisi administrasi yang kuat mengakar seperti halnya di negara-negara kontinental tersebut. Tradisi demikian bisa dikembangkan melalui yurisprudensi yang kemudian akan menimbulkan norma-norma. Secara umum prinsip dari Hukum Tata Usaha Negara kita selalu dikaitkan dengan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang konkretisasi normanya maupun pengertiannya masih sangat luas sekali dan perlu dijabarkan melalui kasus-kasus yang konkret”.¹⁴

¹³ Ridwan HR, Op.Cit, hal 240.

¹⁴ Ibid. Hal 253

Tidak dicantumkannya AAUPB dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan berarti eksistensinya tidak diakui sama sekali, karena ternyata seperti yang terjadi di Belanda-AAUPB ini diterapkan dalam praktik peradilan, terutama pada PTUN. Kalupun AAUPB ini tidak diakomodir dalam undang-undang PTUN, tetapi sebenarnya asas-asas ini dapat digunakan dalam praktik peradilan di Indonesia karena memiliki sandaran dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Keakiman, yang berbunyi : “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengandalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Kemudian dalam Pasal 27 ayat (1) UU No.14/1970 ditegaskan: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Dengan ketentuan pasal ini, maka asas-asas ini memiliki peluang untuk digunakan dalam proses peradilan administrasi di Indonesia.

Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-unang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan format yang berbeda dengan AAUPB dari negeri Belanda, dalam Pasal 3 UU No.28/2009 disebutkan beberapa asas umum penyelenggara negara, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asaa yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. Asas kepentuingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Asas-asas yang tercantum dalam UU No.28/1999 tersebut pada awalnya ditujukan untuk para penyelenggara negara secara keseluruhan, berbeda dengan asas-asas dalam AAUPB yang sejak semula hanya ditujukan pada pemerintah dalam arti sempit, sesuai dengan istilah “bestuur” pada algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bukan regering atau overheid, yang mengandung arti pemerintah dalam arti luas.

Seiring dengan perjalanan waktu, asas-asas dalam UU No.28/1999 tersebut diakui dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam proses peradilan di PTUN, yakni setelah adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU No.9/2004 disebutkan bahwa keputusan tata usaha negara yang diugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam UU No.28/1999.

Pembaharuandilakukan AAUPB lagi terhadap UU no.28/1999 yang di gantikan UU no.30/2014 dengan tujuan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik yang dengan asas – asas yang di maksud meliputi:¹⁵

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepentingan hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

2. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita

3. Asas Ketidakberpihakan

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan

¹⁵ UU no.30/2014 pasal 10

mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

4. Asas Kecermatan

Asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

6. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan

dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

7. Asas Kepentingan Umum

Asas kepentingan hukum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

8. Asas Pelayanan Yang Baik

Asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud diatas dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

E. Tinjauan Umum Penyelenggaraan APBD

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan

pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah¹⁶.

Menurut Abdul Halim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:¹⁷

1. Adanya rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut.
3. Adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan pada jenis kegiatan dan proyek yang telah dituangkan dalam bentuk angka periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14 mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, "APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember." Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan

¹⁶ UU RI No 15 Tahun 2013

¹⁷ Abdul Halim & Syam Kusufi. Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi. Jakarta: Salemba Empat. 2012. Hal 12

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

F. Tinjauan Umum tentang Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dari manajemen anggaran publik yang mengatur rangkaian perhitungan anggaran dan pendapatan (belanja) pemerintah negara yang meliputi proses; penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pengawasan (evaluasi) pendayagunaan keuangan. Hal ini berarti bahwa segmen pengelolaan keuangan daerah menjadi bagian inti komponen objektif pembicaraan kebijakan publik.

Pengertian keuangan daerah dimuat dalam penjelasan Pasal 156 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah; “semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Menurut Mamesh Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.¹⁸

¹⁸ Bambang Kusmanto, dkk, Hukum Keuangan Negara, Intermedia, Yogyakarta, 1992, hlm.12.

“Menurut Thomas R Dye, kebijakan publik pada hakikatnya menyangkut pilihan pemerintah untuk berbuat atau tidak berbuat (*to do or not to do*) maka keuangan daerah secara manajerial dalam lingkup kebijakan publik menyangkut suatu pilihan bagi pemerintah untuk melakukan aktivitas finansial. Langkah pemerintah melalui perangkat hukum menjadi sesuatu yang penting dalam penentuan arah kebijakan keuangan.”¹⁹

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik akan bermuara pada peningkatan hasil pendapatan daerah dan meningkatnya usaha-usaha pembangunan di daerah tersebut. Kepala daerah yaitu Gubernur Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya kepala daerah dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.²⁰

G. Tinjauan Umum tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

¹⁹ Soekarwo, hukum pengelolaan keuangan daerah, surabaya, airlangga university press, 2005 hal 111

²⁰ Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005 hal 144

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemerintah daerah identik dengan istilah otonomi. Pengertian otonomi pada bidang politik diartikan sebagai hak mengatur sendiri kepentingannya. Definisi tersebut memberikan pengertian bahwa otonomi sendiri berkaitan sebagai bentuk keleluasaan untuk mengatur masalah internal tanpa diintervensi oleh pihak lain dengan kata lain apabila dikaitkan dengan kata daerah maka otonomi daerah sendiri berarti pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan caranya sendiri. Melaksanakan urusan pemerintah daerah dengan asas otonomi bukan berarti kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur daerahnya sendiri, kebebasan itu diartikan sebagai kebebasan yang bertanggung jawab mengingat pusat berperan sebagai pemegang mekanisme kontrol atas implementasi otonomi daerah tersebut agar norma-norma yang terkandung dalam otonomi tidak berlawanan dengan kebijakan yang digariskan oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi pada konsep otonomi daerah yang diantuy Indonesia adalah negara kesatuan.

Menurut C. F. Strong sebagaimana dikutip oleh Inu Kencana Syafiie:

*Government in the broader sense, is changed with the maintenance of the peace and security of state with in and with out. It must therefore, have first military power or the control of armed forces, secondly legislative power or the means of making law, thirdly financial power of the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending of state and of enforcing the law it makes on the state behalf.*²¹

²¹ Inu Kencana Syafiie, Pengantar Filsafat, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 21.

Ciri-ciri pemerintah daerah menurut Oppenheim, antara lain:²²

- a. Adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil dari pada negara
- b. Adanya jumlah penduduk yang mencukupi.
- c. Adanya kepentingan-kepentingan yang coraknya sukar dibedakan.
- d. Adanya organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan tersebut.
- e. Adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut tugas pembantuan. Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut undangundang. Pemerintah daerah lebih difungsikan sebagai pelaksana teknis kebijakan desentralisasi. Konstelasi ini, tidak mengherankan bila keberadaan desentralisasi lebih dipahami pemerintah daerah sebagai kewajiban daripada sebagai hak.

²² Prabawa Utama, Pemerintahan di Daerah, INDHILL CO, Jakarta, 1991, hlm. 11.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, terdapat unsurunsur penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu antara lain sebagai berikut:

a. Kepala Daerah

Kepala daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan tugas dari kepala daerah berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

- 1) memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD.
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.

- 5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah.
- 7) Pelaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi penelitian. Dalam hal ini konteks penelitian empiris adalah penelitian terhadap pelaksanaan perundang – undangan. Alasan penulis memilih yuridis adalah berdasarkan judul yang diangkat Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan karena kurang efektifnya perundang – undangan.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan akan undang – undang no 30 tahun 2014 pasal 10.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan sehubungan dengan penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisioner disebarakan melalui internet. Data primer diperoleh dari kuisioner yang di sebarakan kepada pengunjung yang berkunjung ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana yang dalam hal ini yakni konsultan dan kontraktor yang berkunjung ke kantor dinas tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini sifatnya mendukung data primer dalam hal ini yang di dapat dari Undang – undang, buku – buku ilmu pengetahuan

hukum, jurnal, skripsi, perpustakaan Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta internet yang berhubungan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk menunjang penelitian ini menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

a. Menyebarkan Kuisisioner

Yaitu mengumpulkan data dengan menyebarkan kuisisioner terhadap responden yang berkunjung ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama di bagian Pencairan Dana Proyek yang dalam ini yakni konsultan dan kontraktor.

b. Wawancara

Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara di kantor pemerintahan, konsultan, dan kontraktor kabupaten pasuruan serta dengan instansi yang terkait yaitu CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan disini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berupa peraturan Undang – Undang no 30 tahun 2014.

F. Populasi dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti atau populasi adalah kekeseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penulisan skripsi ini yakni Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pasuruan, pengunjung Kantor Dinas tersebut.

d. Sample

Sample merupakan bagian dari dari populasi yang dapat mewakili populasi. Pengambilan sample dilakukan dengan cara penyebaran kuisisioner terhadap responden yang berkunjung ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dalam hal ini ditetapkan di Bagian Pencairan Dana Proyek.

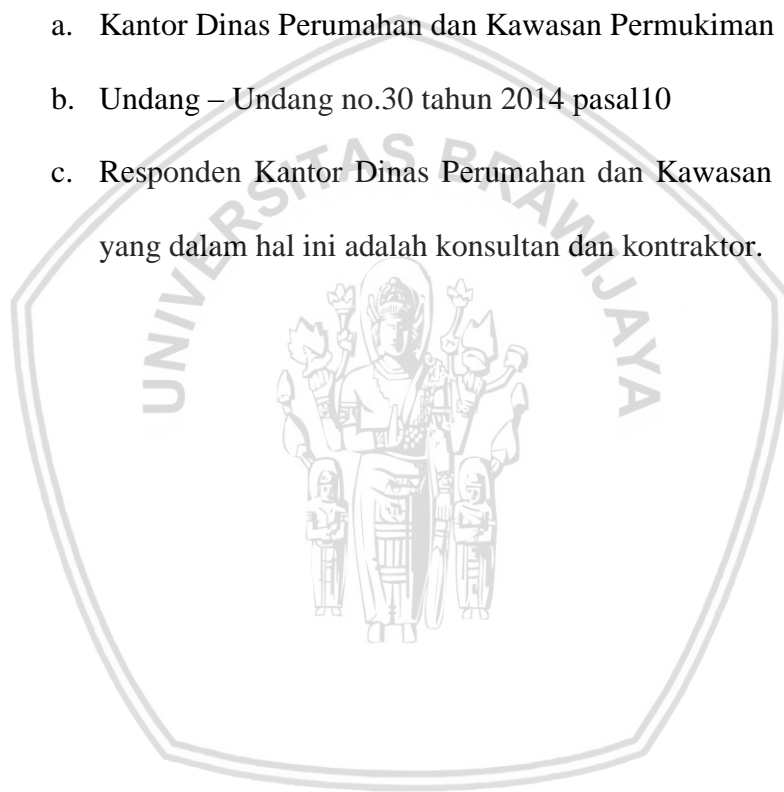
G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah perorganisasian dan mengumpulkan data-data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data-data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian Analisa deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dalam bentuk kuisisioner serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai kesatuan yang utuh.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi kebingungan terhadap data yang diambil untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan karya tulis ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap peneltian karya ilmiah ini sebagai berikut:

- a. Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Undang – Undang no.30 tahun 2014 pasal10
- c. Responden Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dalam hal ini adalah konsultan dan kontraktor.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

H. Pemerintahan Kabupaten Pasuruan

1. Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Pasuruan dengan luas 1.474,015 km² terletak antara 112o33'55" hingga 113o05'37" Bujur Timur dan antara 7o32'34" hingga 7o57'20" Lintang Selatan. Sebelah Utara dibatasi oleh Kota Pasuruan, Selat Madura dan Kabupaten Sidoarjo, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan kondisi geologi Kabupaten Pasuruan sangat beragam, yaitu terdapat 3 jenis batuan meliputi batuan permukaan, batuan sedimen, dan batuan gunung api (gunung api kuarter muda (young quarternary) dan kuarter tua (old quarternary). Selanjutnya secara topografis, kondisi Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan berdasarkan kelerengan dan ketinggian. Tingkat kelerengan Kabupaten Pasuruan meliputi :

- a) Kelerengan 0 - 2% : seluruh Kecamatan Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejosro dan Lekok, sebagian Kecamatan Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Winongan, Grati dan Nguling.

- b) Kelerengan 2 – 5 : sebagian dari Kecamatan Purwodadi, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan, Grati dan Nguling.
- c) Kelerengan 5 - 8%, meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan dan Lekok.
- d) Kelerengan 8 - 15% : sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Pandaan, Gempol, Winongan dan Grati
- e) Kelerengan 15 - 25% : sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Prigen, Gempol dan Beji.
- f) Kelerengan 25 – 45% : sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Purwosari, Prigen dan Gempol.
- g) Kelerengan > 45% : sebagian Kecamatan Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, dan Prigen.

Adapun kondisi menurut ketinggian diuraikan sebagai berikut :

- a) Ketinggian 0 – 12,5 mdpl seluas 18.819,04 Ha atau 12,77%, berpotensi untuk pengembangan usaha perikanan dan pertambakan yaitu di sebagian wilayah Kecamatan Gempol, Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejos, Winongan, Grati, Lekok, dan Nguling.

- b) Ketinggian 12,5 – 500 mdpl seluas 50.384,02 Ha atau 34%, berpotensi untuk pengembangan pertanian, permukiman, dan perindustrian yaitu di sebagian wilayah semua kecamatan, kecuali Kecamatan Tosari.
- c) Ketinggian 500 – 1000 mdpl seluas 21.877,17 Ha atau 14,84%, berpotensi untuk budidaya tanaman keras/tahunan dan sebagai penyangga bagi kawasan perlindungan tanah dan air serta untuk lahan pertanian tanaman pangan dengan sistem teras siring, yaitu di sebagian Kecamatan Lumbang, Gempol, Purwodadi, Tutar, Tosari, Pasrepan, Puspo, Purwosari, dan Prigen.
- d) Ketinggian 1.000 – 2.000 mdpl seluas 18.615,08 Ha atau 12,63%, berfungsi sebagai kawasan penyangga untuk perlindungan tanah dan air, yaitu di sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutar, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Prigen.
- e) Ketinggian > 2000 mdpl seluas 7.920,77 Ha atau sekitar 5,37% dari luas wilayah, dengan peruntukan sebagai hutan lindung yang berfungsi melindungi kawasan bawahannya, yaitu di sebagian wilayah Kecamatan Purwodadi, Tutar, Tosari, Lumbang, Puspo, Purwosari, dan Prigen.

2. Kondisi Demografis

Kondisi demografis Kabupaten Pasuruan tahun 2016 berdasarkan pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 1,85% dan mencapai sejumlah 1.746.089 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-

laki sebanyak 880.810 jiwa dan perempuan sebanyak 865.279 jiwa, dengan sex ratio sebesar 101,79.

b) Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan (data diolah), secara proporsional terbagi menjadi kelompok :

- 1) Tidak/belum tamat sekolah : 17,45%
- 2) Belum tamat SD/ sederajat : 23,33%
- 3) Tamat SD/ sederajat : 28,91%
- 4) SLTP/ sederajat : 13,57%
- 5) SLTA/ sederajat : 13,98%
- 6) Diploma I/II/III : 00,58%
- 7) Diploma IV/ Strata 1 : 02,06%
- 8) Strata 2/3 : 00,11%

Berdasarkan data tersebut penduduk Kabupaten Pasuruan tertinggi tamat SD/ sederajat, kemudian SLTP/SLTA/ Sederajat, dan terendah pada jenjang pendidikan diploma/strata-1/2/3.

c) Komposisi penduduk menurut kelompok umur secara proporsional (data diolah) sebagaiberikut :

- 1) Usia muda (0-14 tahun) : 19,73%
- 2) Usia produktif (15-64 tahun) : 73,22%
- 3) Usia tua (65 tahun ke atas) : 07,05%

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui angka rasio ketergantungan sebesar 36,57 dengan pengertian bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 36 penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua).

d) Komposisi penduduk menurut pekerjaan (data diolah) secara proporsional diperoleh gambaran sebagai berikut :

1) Belum/Tidak Bekerja	:21,79%
2) Pelajar/Mahasiswa	: 15,03%
3) Pensiunan	: 0,33%
4) Pegawai Negeri Sipil (PNS)	: 0,69%
5) TNI/Polri	: 0,20%
6) Petani/Peternak/Nelayan	: 14,69%
7) Karyawan Swasta/BUMN/BUMD	: 20,19%
8) Buruh Harian Lepas	: 0,73%
9) Buruh Tani/Peternakan/Nelayan	: 1,46%
10) Guru/Dosen	: 0,64%
11) Dokter/Bidan/Perawat	: 0,07%
12) Pedagang/Wiraswasta	: 10,65%
13) Lain-Lain	: 13,54%

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang belum/tidak bekerja sebesar 21,79%, kemudian karyawan swasta/BUMN/BUMD sebesar 20,19%, pelajar/mahasiswa 15,03%, petani/peternak/nelayan 14,69%, dan pedagang/wiraswasta 10,65%.

3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Daerah

1. Potensi Daerah

a. Posisi Strategis Wilayah

Posisi geografis Kabupaten Pasuruan yang berada delta jalur ekonomi Surabaya - Jember/Banyuwangi/Bali, Surabaya –

Malang, dan Malang - Jember/Banyuwangi/Bali, sangat strategis dan memiliki nilai ekonomis. Terlebih lagi dengan adanya jalan tol Gempol - Pandaan dan pembangunan jalan tol Gempol – Pasuruan yang sedang berjalan menjadikan Kabupaten Pasuruan menjadi pilihan yang tepat bagi pengembangan investasi manufaktur.

Tabel 4.1
Nama Instansi yang terlibat dalam Proses Pencairan Dana
Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Nama Proyek	PK 9. Peningk. Jl Sukodermo - Kayoman Keperluan Dinas Bina Marga Kab. Pasuruan
Tahun	2018
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Satuan Kerja	Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Pagu	Rp 800.000.000,00
HPS	Rp 798.561.500,00
Nama Pemenang	cv sumber mas abadi
Alamat	Ds. Dayurejo RT.23 RW.12 Kec. Prigen Kab. Pasuruan - Pasuruan (Kab.) - Jawa Timur
NPWP	02.313.470.3-624.000
Harga Penawaran	Rp 766.675.800,00

4. Pendapatan per Kapita dan Nilai Tukar Petani

PDRB perkapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur pendapatan perkapita masyarakat. PDRB perkapita tahun 2015 (angka 2016 belum tersedia di BPS Kabupaten Pasuruan) mencapai Rp. 65,929 juta per jiwa, sedangkan tahun 2014 mencapai Rp. 60,468 juta per jiwa, sehingga terdapat kenaikan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa secara makro kesejahteraan masyarakat meningkat. Perkembangan PDRB

perkapita disajikan pada gambar 5 dan 7. Sedangkan kesejahteraan petani diukur dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Tahun 2016 angka NTP Kabupaten Pasuruan berdasarkan data BPS Kabupaten Pasuruan mencapai 104,13, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai angka 106,19. Meskipun demikian, angka NTP masih di atas angka 100 yang berarti pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluarannya.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari aspek manusia dari tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPM tahun 2016 mencapai angka 65,71 meningkat dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 65,04. Angka IPM beserta komponennya disajikan pada tabel 1.

Tabel 1
IPM Kabupaten Pasuruan dan Komponennya

Uraian	2013	2014	2015	2016
IPM Kab. Pasuruan	63,74	66,35	65,04	65,71
Angka Harapan Hidup (tahun)	69,80	69,83	69,83	69,86
Angka Harapan Sekolah (tahun)	11,63	11,78	11,80	11,81
Rata – rata Lama Sekolah (tahun)	6,08	6,36	6,50	6,58
Pengeluaran Perkapita (rp.000)	8.261	8.293	8.707	9.198

6. PENDAPATAN, BELANJA, dan PEMBIAYAAN DAERAH

a) Pendapatan

Target dan realisasi pendapatan daerah tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016

Kode	Uraian	Anggaran/ Target (rp)	Realisasi (rp)	Lebih/(Kurang) (rp)	%
1	Pendapatan	470.764.895.77	480.758.902	9.994.006.263,60	102,1
	Asli Daerah	5,71	.039,31		2
2	Dana	1.999.656.365.0	1.831.738.7	(167.917.579.848,	91,60
	Perimbangan	45,00	85.197,00	00)	
3	Lain – lain	546.552.196.99	508.952.549	(37.599.647.785,5	93,12
	Pendapatan	4,59	.209,00	9)	
	Yang Sah				
Jumlah Pendapatan		3.016.973.457.8	2.821.450.2	(195.523.221.369,	93,52
		15,30	36.445,31	99)	

b) Belanja Daerah

Target belanja daerah untuk tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp.3.533.964.725.014,78 target tersebut pada tahun 2016 berhasil direalisasikan belanja daerah sebesar rp.3.159.908.438.780,58 atau tercapai sebesar 89,42% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3
Belanja Daerah

Kode	Uraian	Anggaran/ Target	Realisasi (rp)	Lebih/(Kurang) (rp)	%
------	--------	---------------------	-------------------	------------------------	---

		(rp)			
1	Belanja	1.734.172.8	1.562.745.362.94	(171.427.472.969,67)	90,11
	Tidak	35.913,78	4,11		
	Langsung				
2	Belanja	1.779.791.8	1.597.163.075.83	(202.628.813.264,53)	88,74
	Langsung	89.101,00	6,47		
Jumlah Belanja		3.533.964.7	3.159.908.484.78	(374.056.240.234,2)	89,42
Daerah		25.014,78	0,58		

c) Pembiayaan Daerah

Target dan realisasi pembiayaan daerah, struktur anggaran dan realisasi pembiayaan tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 4
Pembiayaan Daerah Tahun 2016

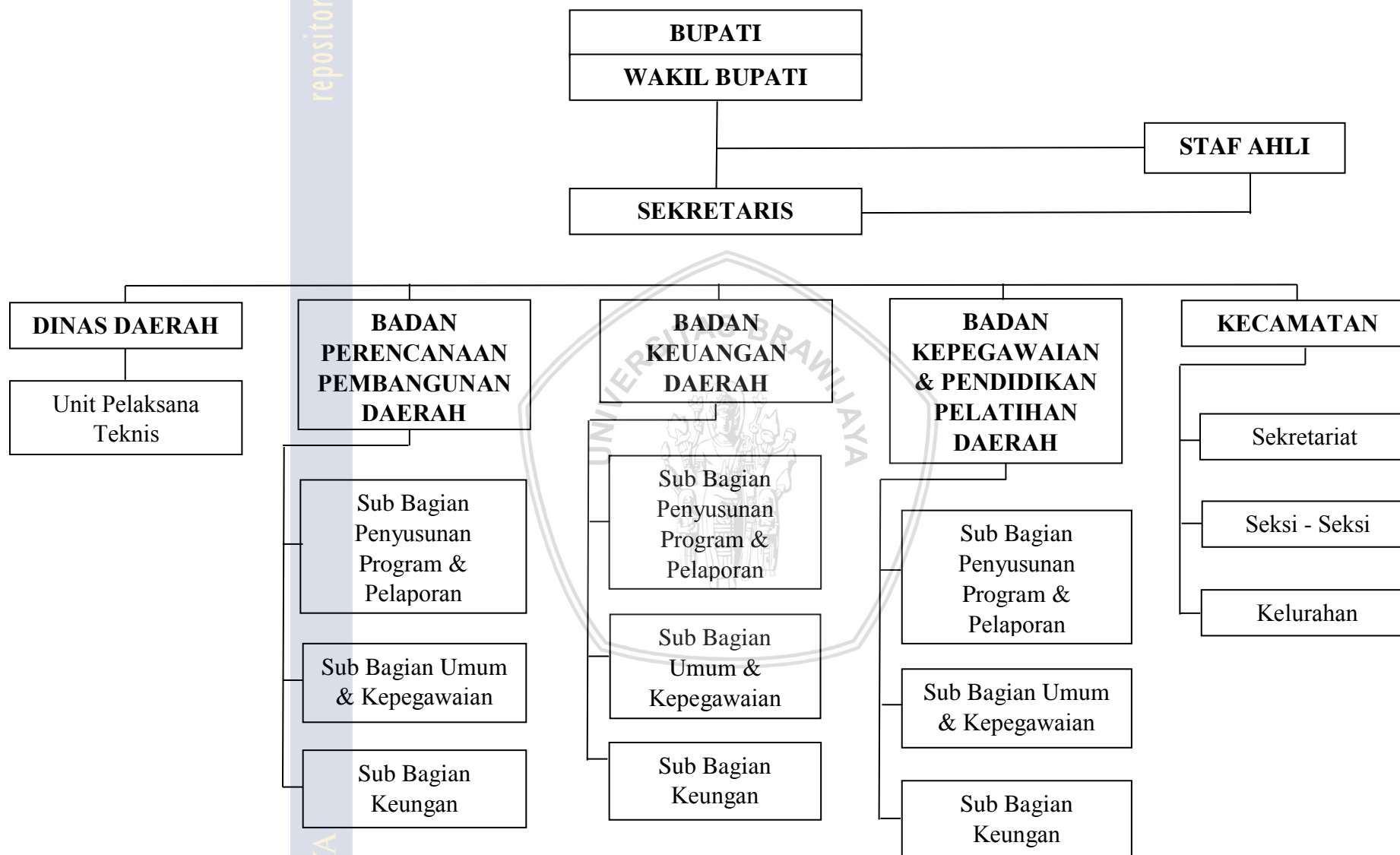
Kode	Pembiayaan Daerah	Anggaran (rp)	Realisasi (rp)	Lebih/(Kurang) (rp)	%
	Jumlah	(516.991.	(338.458.202.	178.533.064.864,	65,47
	Surplus/(Defisit)	267.199,6	335,27)	21	
		8)			
1.1	Pembiayaan				
1.1.1	Penerimaan	543.331.1	543.351.118.1	24.000.000,00	100
	Pembiayaan Daerah	18.167,35	67,35		
1.1.1	Sisa Lebih	543.331.1	543.351.118.1	0,00	100
	Penghitungan Tahun	18.167,35	67,35		
	Anggaran				
	Sebelumnya				
1.1.1.	Pelampauan	42.147.95	42.174.950.41	0,00	100
01	Penerimaan PAD	0.418,34	8,34		
1.1.1.	Pelampauan	58.897.39	58.897.392.00	0,00	100
02	Penerimaan Dana	2.003,00	3,00		
	Perimbangan				

1.1.1.03	Pelampauan Penerimaan Lain – lain Pendapatan Yang Sah	- 20.061.61 5.131,00	(20.061.615.1 31,00)	0,00	100
1.1.1.04	Sisa Penghemat Belanja atau Akibat Lainnya	462.320.3 90.877,01	462.320.390.8 77,01	0,00	100
1.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.1.6.06.01	Penerimaan Piutang Daerah dari Kemlompok Masyarakat	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
1.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	26.339.85 0.967,87	24.398.043.46 9,00	1.965.807.498,87	92,63
1.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	26.339.85 0.967,87	24.398.043.46 9,00	1.965.807.498,87	92,63
	JUMLAH PEMBIAYAAN	516.991.2 67.119,48	518.957.074.6 98,35	1.965.807.498,87	100,3 8
	SISA LEBIH/ (KURANG) ANGGARAN BERJALAN	0,00	180.498.872.3 63,08	180.498.872.363, 08	0,00

7. Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan dapat dilihat sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan



Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan (2016)

I. Proses Pencairan Dana Proyek di Kabupaten Pasuruan

Analisis terkait dengan pencairan dan di Kabupaten pasuruan mengacu pada sebuah alokasi dana dalam sebuah proyek yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pemerintah bersumber dari 2 sumber pendanaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maksud diberikannya APBD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.²³ Dalam hal ini pemerintah harusnya membiayai sebuah pelaksanaan pembangunan desa yang berupa proyek pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman yang dijalankan oleh beberapa proyek di Kabupaten Pasuruan.

Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maksud diberikannya APBD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.²⁴ Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi berpacu pada Perpres no 54 tahun 2010 pasal 35 ayat (3) yang dapat dilakukan dengan cara berikut :

a) Pelelangan umum;

Pelelangan Umum, yaitu metode pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat di ikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.

²³ Perbup nomor 13 tahun 2015 pasal 2

²⁴ Perbup nomor 13 tahun 2015 pasal 2

b) Pelelangan terbatas;

Pelelangan Terbatas, yaitu metode pemilihan Pekerja konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah penyedia mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Pekerjaan yang kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang di desain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).

c) Pemilihan langsung;

Pemilihan Langsung, adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang paling tinggi Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

d) Penunjukan langsung;

Penunjukan Langsung, adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa, paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

e) Pengadaan langsung

Pengadaan Langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung dan dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi yaitu Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyediaanya terbatas dapat dikhususkan dengan, pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi dilakukan dengan pelelangan terbatas. Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan :

- a) Pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/ jasa lainnya; atau
- b) Pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi.

Pelelangan sederhana atau pemilihan langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi dan tidak ada negosiasi teknis dan harga. Pengolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang “Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah”. Pengolaan keuangan daerah harus berazaskan sebagai berikut :

- a) Keuangan daerah harus dikelola secara tertib,
- b) Taat pada peraturan perundang – undangan,
- c) Efektif,
- d) Efisien,
- e) Ekonomis,
- f) Transparan, dan
- g) Bertanggung jawab.

Serta harus memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.²⁵

²⁵ Permen Dalam Negeri no 13 tahun 2006 pasal 4

Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah.

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada salah seorang karyawan CV. Jasa Teman yaitu alias menyun mengatakan bahwa²⁶:

“Pemilihan penyediaan Sarana ini di lakukan dengan cara pemilihan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mana hal ini dikarenakan pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai tidak mencapai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selain itu pelelangan atau pengadaan kegiatan yang sederhana ini dilakukan dengan proses pascakualifikasi dan tidak melakukan negosiasi teknis dan harga dalam pengadaan kegiatan”.

Selain itu, terdapat CV. Aladin Jaya Group yang telah mengajukan sebuah permohonan dalam pencairan dana proyek dan telah dibebankan atas DPPA – SKPD No. 1.04.05.16.02.5.2 pada tanggal 2 Januari 2018 untuk mata anggaran kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari salah satu karyawan yaitu alias telo mengatakan bahwa²⁷:

“Sebuah proses dalam pencairan dana sudah ditentukan yaitu 90 (Sembilan Puluh) hari kalendar terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018 dan sudah selesai proses pencairan dana pada tanggal 17 Jui 2018 dengan nilai pekerjaan

²⁶ Hasil Wawancara kepada alias menyun selaku karyawan CV. Jasa Teman pada tanggal 2 Juni 2018

²⁷ Hasil Wawancara kepada alias telo selaku karyawan CV. Aladin Jaya Group pada tanggal 27 Maret 2018

sebesar Rp. 199.615.000,00 dan kami sudah mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010”

Bendahara umum daerah (BUD) merupakan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Salah satu wewenang BUD memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.

Proses pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf (f) sampai dengan (i), yakni :

- a) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA ; (huruf (f))
- b) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan ; (huruf (g))
- c) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan ; dan (huruf (h))\
- d) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. (huruf (i))

PA/ KPA merupakan kepanjangan dari Pengguna Anggaran sedangkan KPA merupakan Kuasa Pengguna Anggaran.

Proses pencairan dana proyek baru dapat dilakukan ketika sudah memenuhi keempat poin diatas dan akan dilanjutkan dengan dikeluarkannya surat perintah pencairan dana (SP2D). SP2D merupakan

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan surat perintah membayar (SPM). SPM merupakan dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Proses pencairan uang proyek barulah dapat dilakukan setelah mendapat SP2D selanjutnya bilyet giro (BG) untuk pencairan dana dibank.

Dalam sebuah perjanjian atau Surat Perintah Kerja dijelaskan beberapa bagian yang penting, seperti Nilai Kontrak, Waktu Pelaksanaan, serta Sumber dana yang ditanggungkan pada Proyek tersebut. Namun disini penulis melihat adanya kejanggalan atas kurangnya bagian mengenai cara dalam melangsungkan pencairan dana terhadap proyek yang dilakukan antara pihak CV. Jasa Teman maupun CV. Aladin Jaya Group dengan pemerintahan Kabupaten Pasuruan. Beberapa klausul lainnya yang tidak tercantum dalam SuratPerintah Kerja tersebut adalah:

- a) Waktu dan tanggal dapat dilakukannya sebuah pencairan dana pengadaan.

Klausul ini seharusnya dicantumkan kedalam sebuah Surat Perintah Kerja, yang mana dalam melangsungkan pengadaan kegiatan, CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group disini pasti membutuhkan sejumlah dana agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan dalam hasil wawancara yang penulis lakukan dalam pengadaan kegiatan seperti ini biasanya, dana APBD yang keluar dimuka hanya sebesar 30% nya saja. Untuk sisa dana yang 70% nya dikeluarkan

setelah selesai dilakukannya kegiatan pengadaan ini. Idealnya untuk mempermudah CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group dalam melangsungkan pengadaan ini, dalam SPK dicantumkan waktu dan tanggal untuk dilakukannya pencairan dana. Dalam SPK disini pihak yang menerima pengadaan atau CV. Jasa Teman serta CV. Aladin Jaya Group dituntut untuk melakukan pengadaan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan tanggal yang telah dicantumkan. Namun pihak CV. Jasa Teman maupun CV. Aladin Jaya Group tidak dapat menuntut pemerintah untuk mendapatkan jangka waktu yang pasti dan jelas terhadap proses pencairan dana pengadaan kegiatan yang dilakukan oleh CV. Jasa Teman.

b) Tata cara pencairan dana.

Untuk mempermudah jalannya pengadaan kegiatan ini, dan untuk kelancaran dalam administrasi pemerintahan, dilakukanlah sebuah pengaturan mengenai pencairan dana terhadap pengadaan kegiatan tersebut yang mana idealnya lebih menjelaskan mengenai cara dalam melakukan proses pengajuan pencairan dana hingga dilakukannya pencairan dana. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf (f) sampai dengan (i), yakni :

- e) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA ; (huruf (f))

- f) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan ; (huruf (g))
- g) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan ; dan (huruf (h))
- h) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. (huruf (i))²⁸

PA/ KPA merupakan kepanjangan dari Pengguna Anggaran sedangkan KPA merupakan Kuasa Pengguna Anggaran. Isi dari Perpres tersebut hanya menjelaskan mengenai administrasi pada saat proses ingin dilakukannya pencairan dan tidak diberitahukan mengenai tata cara pencairan.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa CV. Jasa Teman telah melakukan hal-hal terkait administrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

- a. CV. Jasa Teman tertanggal 28 Juli 2018 sesuai dengan apa yang tercantum pada SPK telah melangsungkan pelaporan terhadap penyelesaian pelaksanaan.
- b. CV. Jasa Teman juga sudah membuat sebuah berita acara penyerahan hasil dari pengadaan yang dilakukan oleh CV. Jasa Teman. Serta telah melaporkan proses dari kemajuan

²⁸ Perpres no 54 tahun 2010

pengerjaan pengadaan yang dilakukan oleh CV. Jasa Teman.

- c. Untuk melakukan pencairan hal lain yang harus dilakukan oleh CV. Jasa Teman adalah dengan menyimpan segala dokumen atau bukti dari pengadaan kegiatan ini. Hal ini juga diartikan sebagai bukti kepada pihak Pemerintah bahwa CV. Jasa Teman telah melangsungkan pengadaannya dengan baik dan sesuai SPK yang telah disepakati bersama.

Dari hasil wawancara penulis, didapatkan sebuah permasalahan antara CV. Jasa Teman terhadap Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang mana hal tersebut adalah pelaksanaan pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan. Beberapa hal yang dianggap merupakan faktor pendukung untuk kesulitannya dalam melangsungkan pencairan dana adalah dikarenakan tidak adanya sebuah pengaturan mengenai jangka waktu dalam pencairan dana proyek yang bekerja sama dengan pemerintah. Penulis juga mendapatkan hasil dari wawancara bahwa dikarenakan jangka waktu yang diatur masih belum ada karena belum tertera pada peraturan perundang – undangan, sehingga hal tersebut bergantung dari diplomasi kepada pemerintah.

Pihak yang menerima pengadaan atau CV. Jasa Teman dalam SPK dituntut untuk melakukan pengadaan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan tanggal yang telah dicantumkan. Namun, penetapan jangka

waktu tersebut ditentukan tidak berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, dirasa bahwa proses pencairan dana yang dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan khususnya kepada CV. Jasa Teman masih belum efektif dikarenakan masih adanya hambatan terhadap waktu yang ditentukan setelah selesainya proses administrasi.

Adapun hasil wawancara kepada CV. Aladin Jaya Group menunjukkan bahwa CV. Aladin Jaya Group telah mengajukan sesuai dengan tahapan dalam proses pencairan dana mengenai hal – hal yang terkait dengan administrasi yang telah dicantumkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

- a. CV. Aladin Jaya Group tertanggal 17 Juni 2018 sesuai dengan apa yang tercantum pada SPK telah melangsungkan pelaporan terhadap penyelesaian pelaksanaan.
- b. CV. Aladin Jaya Group juga sudah membuat sebuah berita acara penyerahan hasil dari pengadaan yang dilakukan oleh CV. Aladin Jaya Group. Serta telah melaporkan proses dari kemajuan pengerjaan pengadaan yang dilakukan oleh CV. Aladin Jaya Group.
- c. Untuk melakukan pencairan hal lain yang harus dilakukan oleh CV. Aladin Jaya Group adalah dengan menyimpan segala dokumen atau bukti dari pengadaan kegiatan ini. Hal ini juga diartikan sebagai bukti kepada pihak Pemerintah bahwa CV. Aladin Jaya Group telah melangsungkan

pengadaannya dengan baik dan sesuai SPK yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis terhadap CV. Aladin Jaya Group, didapatkan sebuah permasalahan antara CV. Aladin Jaya Group terhadap Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang mana hal tersebut adalah pelaksanaan pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan. Beberapa hal yang dianggap merupakan faktor pendukung untuk kesulitannya dalam melangsungkan pencairan dana adalah dikarenakan tidak adanya sebuah pengaturan mengenai jangka waktu dalam pencairan dana proyek yang bekerja sama dengan pemerintah. Penulis juga mendapatkan sebuah hasil dari wawancara oleh alias telo selaku karyawan CV. Aladin Jaya Group mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya CV. Aladin Jaya Group sudah melakukan proses administrasi sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 terkait dengan proses pengumpulan dokumen, akan tetapi setelah jatuh tempo dan proses pendataan selama waktu yang ditentukan yaitu 90 hari, belum ada keterangan untuk eksekusi terhadap pencairan dana dan kami menunggu pencairan dana tersebut.

Pihak yang menerima pengadaan atau CV. Aladin Jaya Group dalam SPK dituntut untuk melakukan pengadaan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan tanggal yang telah dicantumkan. Namun, setelah proses administrasi selesai, masih belum ada konfirmasi terkait dengan eksekusi terhadap pencairan dana. Disamping itu, proses pencairan dana tersebut akan segera cepat terealisasi ketika adanya sebuah kongsi antara pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan pihak yang terkait berlandaskan

pada material. Adanya sebuah kongsi yang telah dilakukan dirasa telah menyalahi asas *good goverment*. Oleh karena itu, dirasa bahwa eksekusipencairan dana yang dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan khususnya kepada CV. Aladin Jaya Group masih belum efektif dikarenakan masih adanya hambatan terhadap waktu yang ditentukan terhadap eksekusi pencairan dananya.

J. Faktor yang Menghambat Pencairan Dana Proyek di Kabupaten Pasuruan.

Melihat dari beberapa faktor yang menghambat pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan, maka akan dikaji sesuai teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terkait dengan teori efektifitas hukum diantaranya yaitu²⁹:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukumsifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Pada

²⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), halaman 8.

penelitian ini, yang menjadi faktor penghambat adalah faktor hukumnya sendiri. Dapat ditinjau bahwa masih adanya kekosongan terhadap hukum, dimana undang – undang tentang pencairan dana masih belum ada sehingga proses pencairan dana menjadi terhambat. Disamping itu Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 hanya menjelaskan proses atau alur terhadap pencairan dana, akan tetapi masih belum ada landasan terhadap suatu peraturan yang eksplisit terkait dengan waktu yang ditentukan terhadap eksekusi pencairan dana, sehingga jika ada peraturan yang mengatur terkait dengan waktu dalam eksekusi pencairan dana setelah proses administrasi sudah dipenuhi sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, maka proses tersebut berjalan dengan efektif. Upaya yang harus dilakukan adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus bijak dalam suatu pengambilan keputusan terkait dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan rumusan peraturan perundang – undangan, dan disamping itu pemerintah harus membuat suatu perundang – undangan terkait dengan waktu pencairan dana agar berjalan dengan efektif.

Merujuk kembali pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2013 ayat 2 yang menjelaskan bahwa sebagai dokumen yang disusun oleh PA, Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan pernyataan PA mengenai apa yang akan dilakukan dan dihasilkan, berapa anggaran yang disediakan, dan kapan uang tersebut akan dibayarkan oleh PA dalam suatu tahun anggaran tertentu. Pernyataan tersebut sekaligus menginformasikan bahwa PA akan melakukan

pencairan dananya sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Dokumen pelaksanaan anggaran.

Penafsiran dari kata “PA akan melakukan pencairan dananya sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Dokumen pelaksanaan anggaran jadwal yang tercantum” menunjukkan bahwa belum adanya ketentuan atau rumusan yang telah ditentukan dalam proses pencairan dana sehingga wewenang tersebut harus dilandasi dengan peraturan yang telah dirumuskan terkait dengan waktu yang ditentukan dalam proses pencairan dana.

2. Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya, sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut³⁰. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, proses administrasi pencairan dan sudah sesuai dengan peraturan presiden, akan tetapi jika dilihat dari faktor penegak

³⁰ Ibid hal. 10

hukum, pihak aparaturnya melakukan sebuah kongsi terhadap pihak pemohon atau instansi terkait yang bersifat material. Pencairan dana tersebut akan cepat terealisasi jika pihak instansi terkait memberikan dana lebih kepada beberapa oknum pada pihak BUD atau Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap proses pencairan dana yang bertujuan untuk segera terealisasinya pencairan dana tersebut. Hal ini dirasa sangat menghambat proses pencairan dana karena tidak digunakannya prinsip akuntabilitas dalam aparaturnya tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap karyawan CV. Aladin Jaya Group yaitu alias telo mengatakan bahwa:

“Biasanya setelah semua proses terhadap pengajuan pencairan dana pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, akan ditentukan waktu lamanya proses tersebut dalam dokumentasi proses administrasi, setelah semua itu selesai, masih belum adanya konfirmasi dari pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap eksekusi pencairan dananya serta biasanya pihak yang terkait yaitu pihak yang mengajukan jika mengetahui adanya *linkworking* (orang dalam) maka eksekusi dari pencairan dananya akan cepat”

Melihat dari hasil wawancara kepada karyawan CV. Aladin Jaya Group, maka dapat diindikasikan sebagai sebuah hambatan serta ketimpangan terhadap hukum dan aturan yang berlaku serta masih belum sesuai dengan prinsip *good governance* terkait dengan akuntabilitas yang dijalankan. Kenyataan pada yang terjadi di lapangan adalah bahwa pengelolaan keuangan untuk eksekusi pencairan dana masih belum efektif dikarenakan jangka waktu yang masih belum ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group terus menunggu bentuk pencairan

dana tersebut karena dirasa sudah melakukan proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam eksekusi waktu yang akan ditentukan terkait dengan proses pencairan dana harus mengacu pada konsep *Good Governnce* yang tercantum pada Peraturan Menteri Negara No. 1 Tahun 2011 Pasal 3 butir 1 – 3³¹ terkait dengan prinsip dari tata kelola pada badan pemerintahan yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai pengelolaan pemerintahan yang baik. Selain itu, prinsip yang harus dijalani adalah akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga tata kelola pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat terlaksana secara efektif dengan merumuskan suatu aturan untuk waktu yang ditentukan dalam eksekusi pencairan dana. Ke tiga adalah Pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip pemerintahan yang sehat. Pada butir ke tiga, ketentuan waktu terhadap eksekusi pencairan dana masih belum ada karena masih belum adanya peraturan yang mencantumkan waktu – waktu yang ditentukan dalam proses pencairan dana. Seharusnya pemerintah mengupayakan dalam membuat suatu aturan terkait dengan waktu dalam proses pencairan

³¹ Lihat Peraturan Menteri Negara No. 1 Tahun 2011 Pasal 3 butir 1 – 3

dana sehingga proses terhadap pencairan dan khususnya kepada CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group dapat berjalan dengan efektif.

Proses serta administrasi telah tercantum di dalam peraturan dalam Presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf (f) terkait dengan tata cara atau alur dari proses pencairan dana. Namun, ada beberapa faktor yang menghambat eksekusi pencairan dana khususnya pada CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group di Kabupaten Pasuruan yaitu faktor hukum dimana, menurut Pengolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang “Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah”. Pengolaan keuangan daerah harus berazaskan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual³². Pada proses pencairan dana, sarana dan prasarana sudah baik, akan tetapi setelah proses

³² Ibid. Hal. 11

administrasi telah terpenuhi oleh pihak pemohon, sarana tersebut justru digunakan untuk mengkomunikasikan kepada pihak pemohon untuk kepentingan pribadi. Pencairan dana yang dilakukan akan terhambat kecuali jika melakukan komunikasi kepada pihak BUD dengan sebuah kepentingan pribadi agar pencairan dana dapat terealisasi. Hal ini akan menyalahgunakan sarana yang telah disediakan untuk proses kelancaran hukum.

Jika merujuk kepada wewenang dari bendahara umum negara, Menteri Keuangan dapat menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD). Kuasa BUD diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu BUD secara bertanggung jawab melalui penciptaan mekanisme *check and balance* juga.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. kenyataan yang terjadi adalah bahwa pihak dari instansi terkait menyalahgunakan aturan dengan memberikan dana lebih atau suap kepada BUD agar eksekusi pencairan dana dapat terealisasi dengan cepat. Upaya yang harus dilakukan adalah pihak aparatur pemerintah juga harus menjalan

prinsip *good goverment* dalam segala proses dimana hal tersebut akan berimplikasi terhadap kinerja aparatur yang bersih.

5. Faktor budaya

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehinga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif³³. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa adanya kongsi dari pihak aparatur dengan pihak instansi pemohon pencairan dana menjadi sebuah budaya yang sudah terbilang cukup lama. Hal ini akan menimbulkan suatu ketimpangan atas proses kinerja dan reputasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap budaya yang telah terjadi.

Upaya yang harus dilakukan adalah dengan audit secara serentak dan dilakukan pemberantasan terhadap tindakan KKN sehingga hal ini tidak lagi menjadi budaya pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun instansi terkait.

³³ Iffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 23.47 WIB, Tanggal 6September 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pelaksanaan pada laporan terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan pencairan dana proyek di kabupaten pasuruan tidak efektif, dikarenakan dari pihak aparaturnya yang melaksanakan proses pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan tidak melakukan pencairan dana proyek secara objektif /atau mendahulukan orang yang dikenal.
2. Faktor yang menghambat dalam proses pencairan dana antara lain sebagai berikut :
 - a) Faktor hukum itu sendiri memang belum diatur untuk lamanya proses pencairan dana.
 - b) Faktor penegak hukum atau aparaturnya yang berwenang tidak dapat melakukan tugasnya sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik.
 - c) Faktor sarana dan prasarana yang justru digunakan untuk kepentingan pribadi oleh beberapa oknum untuk menyalahgunakan sarana yang telah disediakan untuk proses kelancaran hukum itu sendiri.
 - d) Faktor masyarakat yang kurang sadar akan hukum itu sendiri, sehingga kepatuhan terhadap hukumnya cenderung rendah

yang mengakibatkan adanya kesempatan bagi aparaturnya untuk melakukan tindak kecurangan.

- e) Faktor budaya yang terjadi adalah adanya kongsi dari pihak aparaturnya dengan pihak instansi pemohon pencairan dana menjadi sebuah budaya yang terjadi cukup lama sehingga hal tersebut akan menimbulkan suatu ketimpangan atas proses kinerja dan reputasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap budaya yang telah terjadi.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang dapat diambil, maka saran yang akan direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Pasuruan seharusnya memberikan suatu rumusan waktu dalam suatu perundang – undangan sehingga aturan waktu yang ditentukan jelas dan baik tanpa melakukan suatu penentuan waktu yang belum dilandasi dengan sebuah peraturan perundang-undangan.
2. Harus dibuat suatu ketentuan terkait dengan waktu dari sebuah Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia sehingga Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat merujuk kepada salah satu aturan tersebut terkait dengan waktu eksekusi pencairan dana serta CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group tidak terhambat dalam pencairan dana tersebut.

3. Keberadaan para pihak, yaitu aparat pemerintah, kontraktor, konsultan dan masyarakat sadar akan hukum yang berlaku sehingga terciptalah budaya yang baik dalam proses pencairan dana.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi. Jakarta:Salemba Empat.
- Abdullah Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Kusmanto, dkk. 1992. Hukum Keuangan Negara, Intermedia, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Inu Kencana Syafii. 2005. *Pengantar Filsafat*. Mandar Maju, Bandung.
- Prabawa Utama. 1991. Pemerintahan di Daerah, INDHILL CO. Jakarta.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Ridwan HR. 2008. *Hukum administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, Amrullah. 2010. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, dalam Paulus E. Lotulung, hal 127-128.
- SF. Marbun. 2014. *Hukum Administrasi Negara 2*. Jakarta : FH UII Press.
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Soekarwo. 2005. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya, airangga university press.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Internet :

- Beritasatu.com. 2017. Baru 60 Persen, Pencairan Dana Desa Terkendala APBD Jakarta. Diakses pada Sabtu 28/10 2017.
- Iffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 23.47 WIB, Tanggal 6 September 2018.

Undang-Undang:

- Perpres no 54 tahun 2010
- Permen Dalam Negeri no 13 tahun 2006 pasal 4.

Peraturan Menteri Negara No. 1 Tahun 2011 Pasal 3 butir 1 – 3

UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 7 ayat (1)

UU RI No 15 Tahun 2013

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Wawancara :

Hasil Wawancara kepada alias menyun selaku karyawan CV. Jasa Teman pada tanggal 2 Juni 2018

Hasil Wawancara kepada alias telo selaku karyawan CV. Aladin Jaya Group pada tanggal 27 Maret 2018



**“FAKTOR – FAKTOR YANG MENGHAMBAT DALAM PENCAIRAN
DANA PROYEK DI KABUPATEN PASURUAN (Studi di Kantor Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek)”**

Muhammad Fajar M

081232242034

muhammadfajar12_06@yahoo.co.id

Hukum Administrasi Negara

Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Kabupaten Pasuruan adalah wilayah yang sedang berkembang maka dari itu pelayanan yang diberikan oleh seluruh instansi – instansi yang ada didalamnya terutama dalam hal perizinan haruslah maksimal agar masyarakat tersebut merasa tidak dirugikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara administrasi publik memicu timbulnya gejolak yang berakar ketidak puasan. Di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan pelayanan yang sudah diberikan sudah cukup bagus, akan tetapi masih saja terdapat beberapa oknum yang sering kali menyalahgunakan kewenangannya dalam melayani konsultan ataupun kontraktor yang datang. Hal tersebut dikarenakan perpres no. 54 tahun 2010 tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana prosedur penagihan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi penelitian terkait dengan Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan karena kurang efektifnya perundang – undangan. Hasil yang ditemukan bahwa Faktor yang menghambat dalam proses pencairan dana pada CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group adalah faktor hukum yang mana kenyataan pada yang terjadi di lapangan adalah bahwa pengelolaan keuangan untuk eksekusi pencairan dana masih belum efektif dikarenakan jangka waktu yang ditetapkan masih belum ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap hasil pencairan dana tersebut, sehingga CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group jangka waktu dalam pencairan dananya masih belum dapat diketahui karena belum adanya sebuah peraturan yang berlaku terkait dengan eksekusi pencairan dana.

**Kata Kunci : Efektifitas, Pencairan Dana Proyek, perpres no. 54 tahun 2010,
Pemerintah Kabupaten Pasuruan**

1. Pendahuluan

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik.¹

Kinerja birokrasi pada saat ini merupakan topik pembicaraan yang tiada hentinya untuk dikritisasi, hal tersebut karena kinerja aparatur negara yang dirasa kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dapat dengan mudah dibuktikan dengan dimana tuntutan pelayanan publik sebagai tanda ketidak puasan mereka. Harus diakui, bahwa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat terus mengalami pembaharuan, baik dari segi paradigma maupun format pelayanan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat dan perubahan didalam pemerintah itu sendiri. Meskipun demikian, pembaharuan dapat kita lihat dari kedua sisi tersebut belumlah memuaskan bahkan masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang tidak berdaya dan termarginalisasikan dalam kerangka pelayanan.

Pada dasarnya bentuk pelayanan di Indonesia masih sangatlah buruk dikarenakan proses birokrasi itu sendiri yang sangat berbelit – belit. Ketidak -efisienan dan efektifnya kinerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya merupakan salah satu faktor penghambat dalam memberikan bentuk pelayanan publik. Pelayanan dapat dikatakan baik, apabila pelayan tersebut dapat memenuhi kepuasan pelanggan, dan kepuasan tersebut akan tercapai apabila pelayanan yang mereka terima dapat melebihi apa yang mereka dapat.

Kabupaten Pasuruan adalah wilayah yang sedang berkembang maka dari itu pelayanan yang diberikan oleh seluruh instansi – instansi yang ada didalamnya terutama dalam hal perizinan haruslah maksimal agar masyarakat tersebut merasa tidak dirugikan terhadap kinerja aparatur pemerintah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan oleh penyelenggara administrasi publik memicu timbulnya gejala yang berakar ketidak puasan.

Di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan pelayanan yang sudah diberikan sudah cukup bagus, akan tetapi masih saja terdapat beberapa oknum yang sering kali menyalahgunakan kewenangannya dalam melayani konsultan ataupun kontraktor yang datang. Beberapa kasus yang sering kali terjadi konsultan atau kontraktor tersebut telah melengkapi berkas – berkasnya namun pencairan dana proyeknya masih terkesan lama bagi mereka, salah satu kontraktor yaitu CV. Jasa Teman yang beralamat di Jalan Hngtuah Gg. III No.7A, Rt04/Rw01 Kel. Tambaan - Pasuruan. CV tersebut menerangkan bahwa sudah mengurus pencairan dana sesuai dengan prosedur tetapi tetap membutuhkan waktu yang lama untuk pencairan dana yang semestinya harus diterima yang sesuai dengan

¹ Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2000, hlm. 59

perjanjian yang telah diperjanjikan. Hal tersebut dikarenakan perpres no. 54 tahun 2010 tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana prosedur penagihan atas pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan, sedangkan atas keterlambatan pembayaran kepada pengguna anggaran maka pejabat pembuat komitmen (PPK) dapat dimintai ganti rugi bunga yang dihitung dari nilai tagihan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 122 huruf (a) perpres no. 54 tahun 2010 yang berbunyi :

PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau
- b) dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

Adapun langkah – langkah pencairan dana proyek sesuai dengan peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf (f) sampai dengan huruf (i), yakni :

1. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA; (huruf (f))
2. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan; (huruf (g))
3. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan (huruf (h))
4. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. (huruf (i))

CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group mengatakan bahwa proses pencairan dana proyek mengalami hambatan pada proses pencairan dana di Badan Pengolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) yang biasanya 1 minggu paling cepat lamanya sekarang bahkan bisa sampai 1 bulan. CV. Jasa Teman juga mengatakan “kalau terjadi seperti ini terus tentu kami akan mengalami kerugian”.

Perpres no 54 tahun 2010 telah mengatur tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.² Hal tersebut tentunya berkaitan sesuai dengan pasal 10 ayat 1 Undang – Undang no 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan AUPB terdiri dari 8 (delapan) asas diantaranya adalah asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, serta asas pelayanan yang baik.

Asas – asas tersebutlah yang seharusnya menjadi acuan untuk pelayan publik yang terkhususkan di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan?

² Perpres no 54 tahun 2010

2. Apa faktor – faktor yang menghambat pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan?

B. Tujuan penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan. (Studi di Pemerintahan Kabupaten Pasuruan)

2. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji persoalan hukum yang dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi penelitian. Dalam hal ini konteks penelitian empiris adalah penelitian terhadap pelaksanaan perundang – undangan. Alasan penulis memilih yuridis adalah berdasarkan judul yang diangkat Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan karena kurang efektifnya perundang – undangan.

B. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji Penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan akan undang – undang no 30 tahun 2014 pasal 10.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek Di Kabupaten Pasuruan sehubungan dengan penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika kuisioner disebarkan melalui

internet. Data primer diperoleh dari kuisisioner yang di sebarakan kepada pengunjung yang berkunjung ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana yang dalam hal ini yakni konsultan dan kontraktor yang berkunjung ke kantor dinas tersebut.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini sifatnya mendukung data primer dalam hal ini yang di dapat dari Undang – undang, buku – buku ilmu pengetahuan hukum, jurnal, skripsi, perpustakaan Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta internet yang berhubungan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk menunjang penelitian ini menggunakan pengumpulan data sebagai berikut :

a. Menyebarkan Kuisisioner

Yaitu mengumpulkan data dengan menyebarkan kuisisioner terhadap responden yang berkunjung ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terutama di bagian Pencairan Dana Proyek yang dalam ini yakni konsultan dan kontraktor.

b. Wawancara

Mengumpulkan data dengan melakukan wawancara di kantor pemerintahan, konsultan, dan kontraktor kabupaten pasuruan serta dengan instansi yang terkait yaitu CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan disini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berupa peraturan Undang – Undang no 30 tahun 2014.

F. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti atau populasi adalah keleseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penulisan skripsi ini yakni Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pasuruan, pengunjung Kantor Dinas tersebut.

2. Sampel

Sample merupakan bagian dari dari populasi yang dapat mewaki populasi. Pengambilan sample dilakukan dengan cara penyebaran kusioner terhadap responden yang berkunjung ke Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dalam hal ini di tetapkan di Bagian Pencairan Dana Proyek.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah perorganisasian dan mengumpulkan data-data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data-data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian Analisa deskriptif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis dalam bentuk kuisioner serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai kesatuan yang utuh.

H. Definisi Operasional

Definisi Operasional digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi kebingungan terhadap data yang diambil untuk menyamakan pemahaman dan cara pandang terhadap penulisan karya tulis ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penelitian karya ilmiah ini sebagai berikut:

- a. Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- b. Undang – Undang no.30 tahun 2014 pasal10
- c. Responden Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dalam hal ini adalah konsultan dan kontraktor.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pemerintahan Kabupaten Pasuruan

Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Pasuruan dengan luas 1.474,015 km² terletak antara 112o33'55" hingga 113o05'37" Bujur Timur dan antara 7o32'34" hingga 7o57'20" Lintang Selatan. Sebelah Utara dibatasi oleh Kota Pasuruan, Selat Madura dan Kabupaten Sidoarjo, sebelah Selatan dibatasi oleh Kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu, serta sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sedangkan kondisi geologi Kabupaten Pasuruan sangat beragam, yaitu terdapat 3 jenis batuan meliputi batuan permukaan, batuan sedimen, dan batuan gunung api (gunung api kuarter muda (young quarternary) dan kuarter tua (old quarternary)).

Selanjutnya secara topografis, kondisi Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan berdasarkan kelerengan dan ketinggian. Tingkat kelerengan Kabupaten Pasuruan meliputi :

- a. Kelerengan 0 - 2% : seluruh Kecamatan Bangil, Rembang, Kraton, Pohjentrek, Gondangwetan, Rejosro dan Lekok, sebagian Kecamatan Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Winongan, Grati dan Nguling.
- b. Kelerengan 2 – 5 : sebagian dari Kecamatan Purwodadi, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Wonorejo, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan, Grati dan Nguling.
- c. Kelerengan 5 - 8%, meliputi sebagian Kecamatan Purwodadi, Tutur, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Sukorejo, Pandaan, Gempol, Beji, Winongan dan Lekok.

- d. Kelerengan 8 - 15% : sebagian Kecamatan Purwodadi, Tuter, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Kejayan, Purwosari, Prigen, Pandaan, Gempol, Winongan dan Grati
- e. Kelerengan 15 - 25% : sebagian Kecamatan Purwodadi, Tuter, Puspo, Tosari, Lumbang, Pasrepan, Purwosari, Prigen, Gempol dan Beji.
- f. Kelerengan 25 – 45% : sebagian Kecamatan Purwodadi, Tuter, Puspo, Tosari, Lumbang, Purwosari, Prigen dan Gempol.
- g. Kelerengan > 45% : sebagian Kecamatan Tuter, Puspo, Tosari, Lumbang, dan Prigen.

Kondisi Demografis

Kondisi demografis Kabupaten Pasuruan tahun 2016 berdasarkan pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 1,85% dan mencapai sejumlah 1.746.089 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari laki-laki sebanyak 880.810 jiwa dan perempuan sebanyak 865.279 jiwa, dengan sex ratio sebesar 101,79.
- b. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan (data diolah), secara proporsional terbagi menjadi kelompok diantaranya adalah tidak/belum tamat sekolah sebanyak 17,45% ,belum tamat SD/ sederajat sebanyak 23,33%, tamat SD/ sederajat sebanyak 28,91%, SLTP/ sederajat sebanyak 13,57%, SLTA/ sederajat sebanyak : 13,98%, Diploma I/II/III sebanyak 00,58%, Diploma IV/Strata 1 sebanyak 02,06% dan Strata 2/3 sebanyak 00,11%.

Berdasarkan data tersebut penduduk Kabupaten Pasuruan tertinggi tamat SD/ sederajat, kemudian SLTP/SLTA/ Sederajat, dan terendah pada jenjang pendidikan diploma/strata-1/2/3.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur secara proporsional (data diolah) sebagai berikut :

- 1) Usia muda (0-14 tahun) : 19,73%
- 2) Usia produktif (15-64 tahun) : 73,22%
- 3) Usia tua (65 tahun ke atas) : 07,05%

Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui angka rasio ketergantungan sebesar 36,57 dengan pengertian bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 36 penduduk usia nonproduktif (usia muda dan usia tua).

Komposisi penduduk menurut pekerjaan (data diolah) secara proporsional diperoleh gambaran yaitu diantaranya adalah belum/Tidak Bekerja sebesar 21,79%,

pelajar/mahasiswa sebesar 15,03%, pensiunan sebesar 0,33%, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebesar 0,69%, TNI/Polri sebesar 0,20%, Petani/Peternak/Nelayan sebesar 14,69%, Karyawan Swasta/BUMN/BUMD sebesar 20,19%, Buruh Harian Lepas sebesar 0,73%, Buruh Tani/Peternakan/Nelayan sebesar 1,46%, Guru/Dosen sebesar 0,64%, Dokter/Bidan/Perawat sebesar 0,07%, Pedagang/Wiraswasta sebesar 10,65% serta Lain-Lain sebesar 13,54%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang belum/tidak bekerja sebesar 21,79%, kemudian karyawan swasta/BUMN/BUMD sebesar 20,19%, pelajar/mahasiswa 15,03%, petani/peternak/nelayan 14,69%, dan pedagang/wiraswasta 10,65%.

Kondisi Ekonomi dan Sosial Daerah

Potensi Daerah

Posisi geografis Kabupaten Pasuruan yang berada delta jalur ekonomi Surabaya - Jember/Banyuwangi/Bali, Surabaya – Malang, dan Malang - Jember/Banyuwangi/Bali, sangat strategis dan memiliki nilai ekonomis. Terlebih lagi dengan adanya jalan tol Gempol - Pandaan dan pembangunan jalan tol Gempol – Pasuruan yang sedang berjalan menjadikan Kabupaten Pasuruan menjadi pilihan yang tepat bagi pengembangan investasi manufaktur.

Tabel 1

Nama Instansi yang terlibat dalam Proses Pencairan Dana Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Nama Proyek	PK 9. Peningk. Jl Sukodermo - Kayoman Keperluan Dinas Bina Marga Kab. Pasuruan
Tahun	2018
Kategori	Pekerjaan Konstruksi
Instansi	Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
Satuan Kerja	Unit Layanan Pengadaan (ULP)
Pagu	Rp 800.000.000,00
HPS	Rp 798.561.500,00
Nama Pemenang	cv sumber mas abadi
Alamat	Ds. Dayurejo RT.23 RW.12 Kec. Prigen Kab. Pasuruan - Pasuruan (Kab.) - Jawa Timur
NPWP	02.313.470.3-624.000
Harga Penawaran	Rp 766.675.800,00

Pertumbuhan Ekonomi dan Struktur Perekonomian

Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan peningkatan volume PDRB atas dasar harga konstan antara tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sampai dengan laporan ini disusun BPS Kabupaten Pasuruan belum menyampaikan datanya, sehingga data terakhir yang digunakan tahun 2015. Perekonomian di wilayah Kabupaten Pasuruan tahun 2015

tumbuh sebesar 5,47%. Kondisi tersebut menunjukkan perlambatan dibandingkan tahun 2014 yang tumbuh sebesar 6,69%. Pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dipengaruhi oleh tiga lapangan usaha terbesar yaitu Transportasi dan Pergudangan yang tumbuh sebesar 8,40%, kemudian lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 8,31%, dan Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,72%. Sedangkan 14 (empat belas) lapangan usaha lainnya dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,15%. Volume PDRB Kabupaten Pasuruan tahun 2015 mencapai Rp.103.59 Trilyun. Kontribusi terbesar pada lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 55,92%, kemudian Konstruksi 13,51%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor 9,23%, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8,05%, serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3,63%. Sedangkan 12 (dua belas) lapangan usaha lainnya berkontribusi sebesar 9,66%.

Pendapatan per Kapita dan Nilai Tukar Petani

PDRB perkapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur pendapatan perkapita masyarakat. PDRB perkapita tahun 2015 (angka 2016 belum tersedia di BPS Kabupaten Pasuruan) mencapai Rp. 65,929 juta per jiwa, sedangkan tahun 2014 mencapai Rp. 60,468 juta per jiwa, sehingga terdapat kenaikan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa secara makro kesejahteraan masyarakat meningkat. Perkembangan PDRB perkapita disajikan pada gambar 5 dan 7. Sedangkan kesejahteraan petani diukur dengan indikator Nilai Tukar Petani (NTP). Tahun 2016 angka NTP Kabupaten Pasuruan berdasarkan data BPS Kabupaten Pasuruan mencapai 104,13, sedikit menurun dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai angka 106,19. Meskipun demikian, angka NTP masih di atas angka 100 yang berarti pendapatan petani masih lebih besar dibandingkan pengeluarannya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari aspek manusia dari tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPM tahun 2016 mencapai angka 65,71 meningkat dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 65,04. Angka IPM beserta komponennya disajikan pada tabel 2.

Tabel 2
IPM Kabupaten Pasuruan dan Komponennya

Uraian	2013	2014	2015	2016
IPM Kab. Pasuruan	63,74	66,35	65,04	65,71

Angka Harapan Hidup (tahun)	69,80	69,83	69,83	69,86
Angka Harapan Sekolah (tahun)	11,63	11,78	11,80	11,81
Rata – rata Lama Sekolah (tahun)	6,08	6,36	6,50	6,58
Pengeluaran Perkapita (rp.000)	8.261	8.293	8.707	9.198

B. P
ros

es Pencairan Dana Proyek di Kabupaten Pasuruan

Alokasi dana dalam sebuah proyek yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pemerintah bersumber dari 2 sumber pendanaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maksud diberikannya APBD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.³ Dalam hal ini pemerintah harusnya membiayai sebuah pelaksanaan pembangunan desa yang berupa proyek pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman yang dijalankan oleh beberapa proyek di Kabupaten Pasuruan.

Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Maksud diberikannya APBD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴ Pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi berpacu pada Perpres no 54 tahun 2010 pasal 35 ayat (3) yang dapat dilakukan dengan cara berikut :

- a) Pelelengan umum;
Pelelengan Umum, yaitu metode pemilihan penyedia barang/jasa konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat di ikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Kostruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
- b) Pelelengan terbatas;
Pelelengan Terbatas, yaitu metode pemilihan Pekerja konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah penyedia mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Pekerjaan yang kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang di desain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah).
- c) Pemilihan langsung;

³ Perbup nomor 13 tahun 2015 pasal 2

⁴ Perbup nomor 13 tahun 2015 pasal 2

Pemilihan Langsung, adalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang paling tinggi Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

d) Penunjukan langsung;

Penunjukan Langsung, adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang/jasa, paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

e) Pengadaan langsung

Pengadaan Langsung, yaitu Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung dan dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi yaitu Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pelelangan sederhana atau pemilihan langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi dan tidak ada negosiasi teknis dan harga. Pengolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang “Pedoman Pengolaan Keuangan Daerah”. Pengolaan keuangan daerah harus berazaskan sebagai berikut :

- a) Keuangan daerah harus dikelola secara tertib,
- b) Taat pada peraturan perundang – undangan,
- c) Efektif,
- d) Efisien,
- e) Ekonomis,
- f) Transparan, dan
- g) Bertanggung jawab.

Serta harus memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.⁵

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada salah seorang karyawan CV. Jasa Teman yaitu alias menyun mengatakan bahwa⁶:

“Pemilihan penyediaan Sarana ini di lakukan dengan cara pemilihan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang mana hal ini dikarenakan pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai tidak mencapai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selain itu pelelangan atau pengadaan kegiatan yang sederhana ini dilakukan dengan proses pascakualifikasi dan tidak melakukan negosiasi teknis dan harga dalam pengadaan kegiatan”.

Selain itu, terdapat CV. Aladin Jaya Group yang telah mengajukan sebuah permohonan dalam pencairan dana proyek dan telah dibebankan atas DPPA – SKPD No. 1.04.05.16.02.5.2 pada tanggal 2 Januari 2018 untuk mata anggaran

⁵ Permen Dalam Negeri no 13 tahun 2006 pasal 4

⁶ Hasil Wawancara kepada Muhammad Mas Agus Suryokusumo selaku karyawan CV. Jasa Teman pada tanggal 2 Juni 2018

kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi masyarakat miskin. Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari salah satu karyawan yaitu alias telo mengatakan bahwa⁷:

“Sebuah proses dalam pencairan dana sudah ditentukan yaitu 90 (Sembilan Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Maret 2018 dan sudah selesai proses pencairan dana pada tanggal 17 Jui 2018 dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 199.615.000,00 dan kami sudah mengacu kepada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 ”

Proses pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 pasal 11 ayat (1) huruf (f) sampai dengan (i), yakni :

- a) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA ; (huruf (f))
- b) Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/ Jasa kepada PA/ KPA dengan Berita Acara Penyerahan ; (huruf (g))
- c) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/ KPA setiap triwulan ; dan (huruf (h))
- d) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa. (huruf (i))

Proses pencairan dana proyek baru dapat dilakukan ketika sudah memenuhi keempat poin diatas dan akan dilanjutkan dengan dikeluarkannya surat perintah pencairan dana (SP2D). SP2D merupakan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan surat perintah membayar (SPM). SPM merupakan dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) – satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Proses pencairan uang proyek barulah dapat dilakukan setelah mendapat SP2D selanjutnya bilyet giro (BG) untuk pencairan dana di bank.

Dalam sebuah perjanjian atau Surat Perintah Kerja dijelaskan beberapa bagian yang penting, seperti Nilai Kontrak, Waktu Pelaksanaan, serta Sumber dana yang ditanggungkan pada Proyek tersebut. Namun disini penulis melihat adanya kejanggalan atas kurangnya bagian mengenai cara dalam melangsungkan pencairan dana terhadap proyek yang dilakukan antara pihak CV. Jasa Teman maupun CV. Aladin Jaya Group dengan pemerintahan Kabupaten Pasuruan.

Dari hasil wawancara penulis, didapatkan sebuah permasalahan antara CV. Jasa Teman terhadap Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang mana hal tersebut adalah pelaksanaan pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan. Beberapa hal yang dianggap merupakan faktor pendukung untuk kesulitannya dalam melangsungkan pencairan dana adalah dikarenakan tidak adanya sebuah pengaturan mengenai jangka waktu dalam pencairan dana proyek yang bekerja sama dengan pemerintah. Penulis juga mendapatkan hasil dari wawancara bahwa dikarenakan jangka waktu

⁷ Hasil Wawancara kepada alias telo selaku karyawan CV. Aladin Jaya Group pada tanggal 27 Maret 2018

yang diatur masih belum ada karena belum tertera pada peraturan perundang – undangan, sehingga hal tersebut bergantung dari diplomasi kepada pemerintah.

Pihak yang menerima pengadaan atau CV. Jasa Teman dalam SPK dituntut untuk melakukan pengadaan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan tanggal yang telah dicantumkan. Namun, penetapan jangka waktu setelah proses administrasi tersebut tidak dapat diketahui. Oleh karena itu, dirasa bahwa proses pencairan dana yang dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan khususnya kepada CV. Jasa Teman masih belum efektif dikarenakan masih adanya hambatan terhadap waktu yang ditentukan setelah selesainya proses administrasi.

Adapun hasil wawancara kepada CV. Aladin Jaya Group menunjukkan bahwa CV. Aladin Jaya Group telah mengajukan sesuai dengan tahapan dalam proses pencairan dana mengenai hal – hal yang terkait dengan administrasi yang telah dicantumkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

Berdasarkan pada hasil wawancara penulis terhadap CV. Aladin Jaya Group, didapatkan sebuah permasalahan antara CV. Aladin Jaya Group terhadap Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang mana hal tersebut adalah pelaksanaan pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan. Beberapa hal yang dianggap merupakan faktor pendukung untuk kesulitannya dalam melangsungkan pencairan dana adalah dikarenakan tidak adanya sebuah pengaturan mengenai jangka waktu dalam pencairan dana proyek yang bekerja sama dengan pemerintah. Penulis juga mendapatkan sebuah hasil dari wawancara oleh alias telo selaku karyawan CV. Aladin Jaya Group mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya CV. Aladin Jaya Group sudah melakukan proses administrasi sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 terkait dengan proses pengumpulan dokumen, akan tetapi setelah jatuh tempo dan proses pendataan selama waktu yang ditentukan yaitu 90 hari, belum ada keterangan untuk eksekusi terhadap pencairan dana dan kami menunggu pencairan dana tersebut.

Pihak yang menerima pengadaan atau CV. Aladin Jaya Group dalam SPK dituntut untuk melakukan pengadaan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu dengan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan tanggal yang telah dicantumkan. Namun, setelah proses administrasi selesai, masih belum ada konfirmasi terkait dengan eksekusi terhadap pencairan dana. Disamping itu, proses pencairan dana tersebut akan segera cepat terealisasi ketika adanya sebuah kongsi antara pihak Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan pihak yang terkait berlandaskan pada material. Adanya sebuah kongsi yang telah dilakukan dirasa telah menyalahi asas *good goverment*. Oleh karena itu, dirasa bahwa eksekusi pencairan dana yang dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan khususnya kepada CV. Aladin Jaya Group masih belum efektif dikarenakan masih adanya hambatan terhadap waktu yang ditentukan terhadap eksekusi pencairan dananya.

C. Faktor yang Menghambat Pencairan Dana Proyek di Kabupaten Pasuruan

Melihat dari beberapa faktor yang menghambat pencairan dana proyek di Kabupaten Pasuruan, maka akan dikaji sesuai teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto terkait dengan teori efektifitas hukum diantaranya yaitu⁸:

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja. Pada penelitian ini, yang menjadi faktor penghambat adalah faktor hukumnya sendiri. Dapat ditinjau bahwa masih adanya kekosongan terhadap hukum, dimana undang – undang tentang pencairan dana masih belum ada sehingga proses pencairan dana menjadi terhambat. Disamping itu Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 hanya menjelaskan proses atau alur terhadap pencairan dana, akan tetapi masih belum ada landasan terhadap suatu peraturan yang eksplisit terkait dengan waktu yang ditentukan terhadap eksekusi pencairan dana, sehingga jika ada peraturan yang mengatur terkait dengan waktu dalam eksekusi pencairan dana setelah proses administrasi sudah dipenuhi sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, maka proses tersebut berjalan dengan efektif. Upaya yang harus dilakukan adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan harus bijak dalam suatu pengambilan keputusan terkait dengan waktu yang ditentukan sesuai dengan rumusan peraturan perundang – undangan, dan disamping itu pemerintah harus membuat suatu perundang – undangan terkait dengan waktu pencairan dana agar berjalan dengan efektif.

Merujuk kembali pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2013 ayat 2 yang menjelaskan bahwa sebagai dokumen yang disusun oleh PA, Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan pernyataan PA mengenai apa yang akan dilakukan dan dihasilkan, berapa anggaran yang disediakan, dan kapan uang tersebut akan dibayarkan oleh PA dalam suatu tahun anggaran tertentu. Pernyataan tersebut sekaligus menginformasikan bahwa PA akan melakukan pencairan dananya sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Dokumen pelaksanaan anggaran.

2) Faktor Penegak Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di

⁸ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), halaman 8.

kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya, sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut⁹. Jika dilihat dari sudut pandang hukum, proses administrasi pencairan dan sudah sesuai dengan peraturan presiden, akan tetapi jika dilihat dari faktor penegak hukum, pihak aparat daerah melakukan sebuah kongsi terhadap pihak pemohon atau instansi terkait yang bersifat material. Pencairan dana tersebut akan cepat terealisasi jika pihak instansi terkait memberikan dana lebih kepada beberapa oknum pada pihak BUD atau Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap proses pencairan dana yang bertujuan untuk segera terealisasikannya pencairan dana tersebut. Hal ini dirasa sangat menghambat proses pencairan dana karena tidak digunakannya prinsip akuntabilitas dalam aparat tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap karyawan CV. Aladin Jaya Group yaitu alias telo mengatakan bahwa:

“Biasanya setelah semua proses terhadap pengajuan pencairan dana pada Pemerintah Kabupaten pasuruan, akan ditentukan waktu lamanya proses tersbut dalam dokumentasi proses administrasi, setelah semua itu selesai, masih belum adanya konfirmasi dari pihak Pemerintah kabupaten Pasuruan terhadap eksekusi pencairan dananya serta biasanya pihak yang terkait yaitu pihak yang mengajukan jika mengetahui adanya *linkworking* (orang dalam) maka eksekusi dari pencairan dananya akan cepat”

Melihat dari hasil wawancara kepada karyawan CV. Aladin Jaya Group, maka dapat diindikasikan sebagai sebuah hambatan serta ketimpangan terhadap hukum dan aturan yang berlaku serta masih belum sesuai dengan prinsip *good governance* terkait dengan akuntabilitas yang dijalankan. Kenyataan pada yang terjadi di lapangan adalah bahwa pengelolaan keuangan untuk eksekusi pencairan dana masih belum efektif dikarenakan jangka waktu yang masih belum ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group terus menunggu bentuk pencairan dana tersebut karena dirasa sudah melakukan proses yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam eksekusi waktu yang akan ditentukan terkait dengan proses pencairan dana harus mengacu pada konsep *Good Governnce* yang tercantum pada Peraturan Menteri Negara No. 1 Tahun 2011 Pasal 3 butir 1 – 3¹⁰ terkait dengan prinsip dari tata kelola pada badan pemerintahan yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai pengelolaan pemerintahan yang baik. Selain itu, prinsip yang harus dijalani adalah

⁹ Ibid hal. 10

¹⁰ Lihat Peraturan Menteri Negara No. 1 Tahun 2011 Pasal 3 butir 1 – 3

akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga tata kelola pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat terlaksana secara efektif dengan merumuskan suatu aturan untuk waktu yang ditentukan dalam eksekusi pencairan dana.

3) Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Pada proses pencairan dana, sarana dan prasarana sudah baik, akan tetapi setelah proses administrasi telah terpenuhi oleh pihak pemohon, sarana tersebut justru digunakan untuk mengkomunikasikan kepada pihak pemohon untuk kepentingan pribadi. Pencairan dana yang dilakukan akan terhambat kecuali jika melakukan komunikasi kepada pihak BUD dengan sebuah kepentingan pribadi agar pencairan dana dapat terealisasi. Hal ini akan menyalahgunakan sarana yang telah disediakan untuk proses kelancaran hukum.

Jika merujuk kepada wewenang dari bendahara umum negara, Menteri Keuangan dapat menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD). Kuasa BUD diberi tugas dan kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu BUD secara bertanggung jawab melalui penciptaan mekanisme *check and balance* juga.

4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa pihak dari instansi terkait menyalahgunakan aturan dengan memberikan dana lebih atau suap kepada BUD agar eksekusi pencairan dana dapat terealisasi dengan cepat. Upaya yang harus dilakukan adalah pihak aparat pemerintah juga harus menjalan prinsip *good government* dalam segala proses dimana hal tersebut akan berimplikasi terhadap kinerja aparat yang bersih.

5) Faktor budaya

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum

adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif¹¹. Kenyataan yang terjadi adalah bahwa adanya kongsi dari pihak aparaturnya dengan pihak instansi pemohon pencairan dana menjadi sebuah budaya yang sudah terbilang cukup lama. Hal ini akan menimbulkan suatu ketimpangan atas proses kinerja dan reputasi Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap budaya yang telah terjadi.

Upaya yang harus dilakukan adalah dengan audit secara serentak dan dilakukan pemberantasan terhadap tindakan KKN sehingga hal ini tidak lagi menjadi budaya pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun instansi terkait.

4. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang berjudul Faktor – Faktor yang Menghambat dalam Pencairan Dana Proyek di Kabupaten Pasuruan (Studi di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Bag. Pencairan Dana Proyek) memberikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan proses serta hal yang menghambat dalam laju pencairan dana tersebut terhadap CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group telah melakukan hal-hal terkait administrasi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.
- 2) Faktor yang menghambat dalam proses pencairan dana pada CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group adalah faktor hukum yang mana Kenyataan pada yang terjadi di lapangan adalah bahwa pengelolaan keuangan untuk eksekusi pencairan dana masih belum efektif dikarenakan jangka waktu yang ditetapkan masih belum ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap hasil pencairan dana tersebut, sehingga CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group jangka waktu dalam pencairan dananya masih belum dapat diketahui karena belum adanya sebuah peraturan yang berlaku terkait dengan eksekusi pencairan dana. Disamping itu Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 hanya menjelaskan proses atau alur terhadap pencairan dana, akan tetapi masih belum ada landasan terhadap suatu peraturan yang eksplisit terkait dengan waktu yang ditentukan terhadap eksekusi pencairan dana, sehingga jika ada peraturan yang mengatur terkait dengan waktu dalam eksekusi pencairan dana, maka proses tersebut berjalan dengan efektif.

¹¹ Iffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 23.47 WIB, Tanggal 6 September 2018.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang dapat diambil, maka saran yang akan direkomendasikan adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Pasuruan seharusnya memberikan suatu rumusan waktu dalam suatu perundang – undangan sehingga aturan waktu yang ditentukan jelas dan baik tanpa melakukan suatu penentuan waktu yang yang belum dilandasi dengan sebuah peraturan perundang-undangan.
- 2) Harus dibuat suatu ketentuan terkait dengan waktu dari sebuah Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia sehingga Pemerintah Kabupaten Pasuruan dapat merujuk kepada salah satu aturan tersebut terkait dengan waktu eksekusi pencairan dana serta CV. Jasa Teman dan CV. Aladin Jaya Group tidak terhambat dalam pencairan dana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi*. Jakarta:Salemba Empat.
- Abdullah Rozali. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Kusmanto, dkk. 1992. *Hukum Keuangan Negara*,Intermedia, Yogyakarta.
- Hadjon, Philipus M. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Inu Kencana Syafiie. 2005. *Pengantar Filsafat*. Mandar Maju, Bandung.
- Prabawa Utama. 1991. *Pemerintahan di Daerah*, INDHILL CO. Jakarta.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Ridwan HR. 2008. *Hukum administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, Amrullah. 2010 *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, dalam Paulus E. Lotulung, hal 127-128.
- SF. Marbun. 2014. *Hukum Administrasi Negara 2*. Jakarta : FH UII Press.
- Sinamo, Nomensen. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jala Permata Aksara.

Soekarwo. 2005. *Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya, airlangga university press.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Internet :

Beritasatu.com. 2017. Baru 60 Persen, Pencairan Dana Desa Terkendala APBD Jakarta. Diakses pada Sabtu 28/10 2017.

Iffa Rohmah. 2016. Penegakkan Hukum. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses : Pukul 23.47 WIB, Tanggal 6 September 2018.

Undang-Undang :

Perpres no 54 tahun 2010

Permen Dalam Negeri no 13 tahun 2006 pasal 4.

Peraturan Menteri Negara No. 1 Tahun 2011 Pasal 3 butir 1 – 3

UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 7 ayat (1)

UU RI No 15 Tahun 2013

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Wawancara :

Hasil Wawancara kepada alias menyun selaku karyawan CV. Jasa Teman pada tanggal 2 Juni 2018

Hasil Wawancara kepada alias telo selaku karyawan CV. Aladin Jaya Group pada tanggal 27 Maret 2018